

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FUNGSI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

(Studi Kasus Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004  
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2005)

## **TESIS**

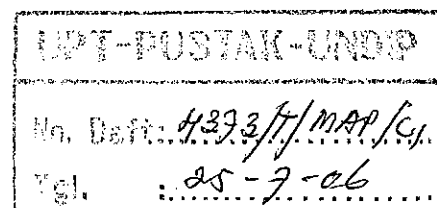
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:  
UMBU PUDA  
D4E000088

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2005**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
FUNGSI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH**

(Studi Kasus Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004  
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2005)


Dipersiapkan dan disusun oleh

Umbu Puda  
D4E000088

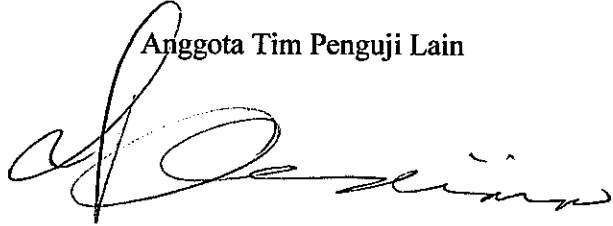
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal: 20 Juni 2005

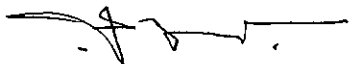
Susunan Tim Penguji


Ketua Penguji/Pembimbing

  
Drs. Ali Mufiz, MPA

Anggota Tim Penguji Lain

  
Drs. Wahyu Pujoyono, SU

  
Drs. Hardi Warsono, MTP

  
Drs. Fathurahman, MSi

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal: Juni 2005  
Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik  
Universitas Diponegoro  
Semarang



Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD

## RINGKASAN

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Propinsi Jawa Tengah sangat kompleks. Beberapa persoalan umum strategis yang muncul di Propinsi Jawa Tengah dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005. Persoalan strategis yang dimaksud antara lain adalah Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2005, Prinsip dan Basis RAPBD, kerawanan sosial, penyakit masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Apabila permasalahan tersebut di atas tidak ditangani secara baik dan benar akan menjadi penghambat utama laju pembangunan, yang pada gilirannya akan dapat menimbulkan krisis yang berlarut-larut. RAPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 yang disampaikan oleh eksekutif masih banyak menimbulkan perbedaan pandangan dengan pihak legislatif dan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya fenomena-fenomena yang timbul, diantaranya adalah RAPBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 tidak mencerminkan kemandirian, rawan duplikasi anggaran, tidak rasional, eksekutif dinilai boros dalam anggaran dan dinilai tidak taat azas efisiensi. Oleh karena itu peran dan fungsi lembaga legislatif sangat diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peran dan fungsi legislatif dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yang dikembangkan oleh Thaib yaitu faktor Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD dan Sarana dan Anggaran. Robert Fried mengatakan faktor Kepemimpinan juga mempengaruhi Peran dan fungsi legislatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah, sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh faktor Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah.

APBD Tahun Anggaran 2005 menunjukkan pendapatan sebesar Rp.2.897.938.086.000,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sedangkan Belanja Daerah adalah sebesar Rp.2.682.191.550.000,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp.215.746.536.000,00 yang kemudian diseimbangkan dengan Pos Pembiayaan yang merupakan selisih antara Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Perhitungan statistik menunjukkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah valid dan memiliki reliabilitas yang tinggi, selain itu juga tidak ditemukan adanya penyimpangan pada pengujian asumsi klasik dimana tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas dan data terdistribusi secara normal, hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model analisis regresi linear. Hasil koefisien standardised menunjukkan secara berturut-turut variabel yang berpengaruh dominan terhadap Fungsi dan Peran DPRD adalah Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan. Hasil uji t menunjukkan variabel Pelaksanaan

Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran secara partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah sedangkan variabel Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah. Hasil uji F atau uji secara bersama-sama menunjukkan variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah, sedangkan koefisien determinasi menunjukkan sebesar 51,1%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib memiliki pengaruh yang relatif paling dominan terhadap Fungsi dan Peran DPRD, oleh karena itu untuk meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD perlu adanya penegakkan Peraturan Tata Tertib di kalangan Anggota DPRD di antaranya berupa pelaksanaan sidang/rapat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemberian sanksi yang tegas terhadap Anggota yang tidak hadir dalam sidang/rapat, penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya koordinasi antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam menangani masalah publik dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan hanya memberikan kontribusi sebesar 51,1% terhadap Fungsi dan Peran DPRD, oleh karena itu perlu dikaji kembali faktor-faktor lain untuk meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD, diantaranya adalah seperti yang dikembangkan oleh Robert Fried yaitu informasi, keahlian, kekuatan sosial, popularitas, legitimasi, kekerasan, peraturan, kekuatan ekonomi, sumber daya manusia dan jabatan politis. Selain itu juga perlu diteliti faktor eksternal yang dikembangkan oleh Thaib yaitu sistem pemilihan umum yang dilakukan, latar belakang sejarah dan iklim politik yang berlaku dan ada tidaknya hak pemanggilan kembali anggota oleh partai politik yang ada (*recall*).

## ABSTRACT

Umbu Puda  
Tahun 2005

### ANALYSIS OF FACTOR'S TO INFLUENCE FUNCTION AND ROLE OF THE REGION PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF CENTRAL JAVA PROVINCE

(Case Study of The Central Java Province Law Number 17 Year 2004 Regarding  
The Income And Expenditure Budget of Central Java Province In 2005)

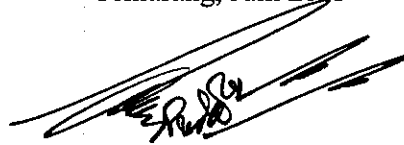
Key word: Region People's Representative Council, implementation of regulation, the member's quality, facilities and budget and leadership.

The aim of this research is to gain an empiric evidence from the influence of the regulation implementation, the member's quality of the Region People's Representative Council, facilities and budget and leadership to the function and role of the Region People's Representative Council of Central Java. The data needed are a primary data and secondary data. The sample choosing in this research is using the *cluster random sampling* method that conducted proportionally to the number of the Region People's Representative Council of Central Java Province. Based on the method, this research used 49 people for its sample. Linear Regression analysis was used to test the given hypothesis. Besides, Validity and Reliability test is conducted and test on classical assumption. Based on research, data is valid and highly reliable, besides, the imprecision of the classic assumption was not found, it shows that the available data has fulfill the condition to use the linear regression analysis model. The result of t test shows that the variable of regulation implementation, the member's quality of the Region People's Representative Council, facilities and budget partially have had positively and significantly influence the function and role of the Region People's Representative Council of Central Java Province, however, the leadership do not have any significant influence. The result of F test shows that the regulation implementation, the quality of the Region People's Representative Council members, facilities and budget and leadership significantly influence the function and role of the Region People's Representative Council of Central Java Province, and the determination coefficient shows 51,1%.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, Juni 2005



Umu Puda

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Drs. Ali Mufiz MPA dalam kesibukannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah dan selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis hingga selesainya karya ilmiah ini.
2. Bapak Drs. Hardi Warsono, MTP selaku dosen pembimbing, yang sungguh menjadi motivator, telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya karya ilmiah ini.
3. Bapak Drs. Wahyu Pujoyono, SU dan Bapak Drs. Fathurahman, Msi selaku dosen yang telah memberikan koreksi dan masukan guna perbaikan karya ilmiah ini.
4. Pimpinan dan seluruh staf yang ada di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama studi dan penyelesaian karya ilmiah ini.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data penelitian.

6. Bapak/Mama John Umbu Riada, Keluarga adik Julius Umbu Saga Anakaka, keluarga adik Daniel Umbu Lobu, keluarga Anthon Umbu Sulung, keluarga A.Sabarua , keluarga adik Fredirika Rambu Kabota, keluarga adik Anton Paliosa dan keluarga adik-adik lain, yang dengan kasih yang tulus banyak memberi dorongan dan motivasi hingga selesainya karya ilmiah ini.
7. Kakak Drs.Dedu Ngara, Usi Rambu Ana Rara, Usi Rambu Roku, Kakak Ir.Umbu Kaludang, Kakak Pdt.Umbu Yoli, Usi Rambu Nedi beserta ponaan-ponaan yang dengan kasih yang tulus, memberi dorongan, motivasi kepada penulis hingga selesainya karya ilmiah ini.
8. Drs.Umbu Tagela Ibileba, Msi dan Drs.Haryanto, yang banyak memberi bantuan, dan motivasi sehingga selesainya penulisan karya ilmiah ini.
9. Anak-anak khusus U S Pekujawang (Nyong), adik Stepanus Umbu S Pekulimu yang setia mengantar ,Ati Rambu.Teba ,anak Gerorge, Ari, Teguh, Dedi, Dominggus dll yang telah membantu ,doa dan motivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
10. Istriku Dra.Rambu Boba, MPd dan anak-anakku tercinta, Umbu eda Padjangu (Ade) Umbu Sappi Pateduk (Rio), Kresna Umbu Haingu, Natasya Rambu Kadunga, terima kasih telah memberikan semangat, perhatian, dorongan dan doa kepada penulis.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Semarang, Juni 2005

Penulis



## **MOTTO**

**“Melayani Bukan Untuk Dilayani”**

## DAFTAR ISI

Nomor		Halaman
	HALAMAN JUDUL	i
	HALAMAN PENGESAHAN	ii
	RINGKASAN	iii
	ABSTRACT	v
	HALAMAN PERNYATAAN	vi
	KATA PENGANTAR	vii
	MOTTO	ix
	DAFTAR ISI	x
	DAFTAR TABEL	xii
	DAFTAR GAMBAR	xiii
	DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BABI	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	10
	D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II	<b>KAJIAN PUSTAKA</b>	12
	A. Otonomi Daerah	12
	B. Lembaga Legislatif Daerah	19
	C. Fungsi dan Peran Lembaga Legislatif	28
	D. Proses Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah	41
	E. Penyusunan dan Penetapan APBD	43
	F. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	48
BAB III	<b>METODE PENELITIAN</b>	51
	A. Rancangan Penelitian	51
	B. Ruang Lingkup	51
	C. Lokasi Penelitian	52
	D. Variabel Penelitian	53
	1. Klasifikasi Variabel	53
	2. Definisi Konseptual	53
	3. Definisi Operasional	55
	E. Jenis dan Sumber Data	57
	F. Instrumen Penelitian	58
	G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	58
	H. Teknik Pengumpulan Data	60
	I. Teknik Analisis Data	61
	1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	61
	2. Uji Asumsi Klasik	62
	3. Analisis Regresi Berganda	64

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL</b>	<b>67</b>
	A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	67
	1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004	67
	2. Gambaran Umum Responden	70
	3. Statistik Distribusi Frekuensi	76
	B. Pengujian Reliabilitas dan Validitas	87
	1. Pengujian Reliabilitas	87
	2. Pengujian Validitas	88
	C. Uji Asumsi Klasik	90
	1. Uji Autokorelasi	90
	2. Uji Heteroskedastisitas	91
	3. Uji Multikolinearitas	92
	4. Uji Normalitas Data	94
	D. Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis	96
	1. Analisis Koefisien Regresi dan Uji Secara Partial	96
	2. Uji Pengaruh Secara Bersama-sama	100
	3. Analisis Determinasi	101
	E. Diskusi	102
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>105</b>
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran	106
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>108</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Sampel Penelitian	60
2. Jabatan Responden	71
3. Jenis Kelamin Responden	71
4. Pendidikan Responden	72
5. Agama Responden	73
6. Umur Responden	73
7. Fraksi Responden	74
8. Pekerjaan Responden	75
9. Distribusi Frekuensi Variabel Fungsi dan Peran DPRD	77
10. Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib	80
11. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Anggota DPRD	82
12. Distribusi Frekuensi Variabel Sarana dan Anggaran	83
13. Distribusi Frekuensi Variabel Kepemimpinan	85
14. Alpha Cronbach	88
15. Koefisien Korelasi Pearson	89
16. Durbin-Watson Statistik	91
17. Nilai Tolerance dan VIF	93
18. Matrik Korelasi Antar Variabel Bebas	93
19. Analisis Koefisien Regresi dan Uji Secara Partial	97
20. Pengujian Secara Bersama-sama	100
21. Hasil Analisis Determinasi dan Uji Secara Bersama-sama	101

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	48
2. Model Hipotesis	49
3. Grafik Scatterplot	92
4. Grafik Histogram	95
5. Grafik Grafik Normal Plot	95

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
A. Kuesioner	111
B. Data Penelitian	119
C. Hasil Analisis	120

## **BABI PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mencoba meletakkan kembali dasar-dasar politik otonomi yang lebih wajar sesuai kehendak konstitusi. Undang-undang ini menghendaki titik berat penyelenggaraan pemerintahan ada pada daerah. Semua kepentingan masyarakat pada dasarnya diatur dan diurus Pemerintah Daerah, kecuali terhadap hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan dan diurus oleh Pemerintah Pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal, agama dan beberapa kebijakan tingkat nasional tertentu (Manan, 1999:4).

Pemerintahan Daerah disusun, diisi dan diawasi menurut prinsip yang lebih demokratis dengan meletakkan tanggungjawab politik lebih besar kepada rakyat daerah seperti pemilihan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD setempat (Gafar, 2000:79). Atas dasar itu, maka pemberdayaan DPRD sangat menentukan dalam upaya melaksanakan politik otonomi daerah. Pemberdayaan adalah upaya agar DPRD mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab, baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai pengemban pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah (Manan, 1999a:6). Upaya pemberdayaan DPRD bukan merupakan hal mudah, hal ini disebabkan karena: (1). Sistem politik yang sentralistik dan tidak demokratis selama 40 tahun terakhir. DPRD tidak dapat menjalankan

tugas sebagai instrumen pemerintahan otonom yang demokratis sebagaimana mestinya, hal ini tidak hanya disebabkan karena kurang atau tidak berpengalaman, melainkan DPRD kehilangan kesempatan menumbuhkan tradisi berotonomi sebagai sub sistem dalam melaksanakan demokrasi dan menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. (2). Perubahan politik akibat reformasi menimbulkan pula banyak persoalan. Meskipun telah ada suasana kebebasan, tetapi sistem rekrutmen anggota DPRD belum dapat sepenuhnya didasarkan pada kecakapan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengelola otonomi. Rekrutmen anggota DPRD masih dipengaruhi oleh suasana revolusioner atau dorongan solidaritas belaka yang mungkin akan sangat mempengaruhi kecakapan dan mutu tenaga maupun keluarannya, (3). Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetapi secara keseluruhan masih terdapat ketentuan dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita demokrasi.

Dalam kondisi galau dan gamang seperti itulah DPRD mulai melaksanakan tugasnya, demi kemaslahatan pembangunan di daerah. DPRD dengan tugas utama merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah, menyusun dan menetapkan APBD dan melakukan pengawasan terasa sangat berat. Sebab dipundaknyalah nasib rakyat di daerah dipertaruhkan. Oleh karena itu, DPRD bukan lagi memainkan peranan sebagai *political sphere*



tetapi lebih bersifat *service sphere* untuk lebih mengefektifkan *public sphere* dalam rangka membangun kesejahteraan umum bagi rakyat di daerah.

Salah satu prinsip dasar otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan fungsi dan peran badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberdayakan sedemikian rupa melalui pemberian tugas, hak dan wewenang yang cukup luas sehingga benar-benar dapat melakukan fungsinya serta sungguh-sungguh berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam rangka pengembangan demokrasi lokal.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya Pemerintah Daerah otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Pemahaman ini sekaligus menyajikan pandangan bahwa lembaga legislatif perlu terus mengembangkan dirinya, yang tentunya tidak bisa terlepas dari dinamika kualitas infrastruktur politik, hubungan dengan lembaga lainnya dalam bingkai nilai-nilai pemerintahan nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat daerah yang mencerminkan struktur dan sistem

pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung dalam pasal 18 UUD 1945, penjabarannya lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang (pasal 42), hak (pasal 43 dan 44) dan kewajiban (pasal 45) di dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Pemberian hak-hak luas kepada DPRD merupakan salah satu petunjuk bahwa upaya demokratisasi Pemerintah Daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata.

Secara umum, fungsi badan perwakilan berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi keuangan dan fungsi pengawasan. Keseluruhan hak DPRD yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut. Sebagai lembaga legislatif, DPRD berfungsi membuat peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijakan keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau ikut merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun APBD. Selain itu, DPRD mempunyai hak untuk menentukan anggaran belanja sendiri. Dalam konteks pengawasan, menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan oleh DPRD, merupakan tahap pertama dalam proses pengawasan. Penilaian terhadap

pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis, yang tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan.

DPRD sebagai organisasi publik, senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan, sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisiensi, kompetitif, adaptif dan responsibility dalam mencapai tujuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif sebagai representasi dari masyarakat/rakyat yang diwakilinya, pelaksanaan akan tugas pokok merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *output* guna pencapaian tujuan dari keberadaan lembaga ini. Pada umumnya, kinerja organisasi adalah seberapa jauh *output* yang dihasilkan memenuhi target (rencana yang ditetapkan) sehingga optimalisasi fungsi dan peran DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat krusial. Karena itu penguatan posisi lembaga DPRD di era otonomi daerah ini merupakan kebutuhan yang harus diupayakan jalan keluarnya, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan hak-haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Optimalisasi fungsi dan peran ini sangat dipengaruhi banyak faktor baik faktor internal maupun eksternal lembaga ini.

## B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, sorotannya kemudian adalah bagaimana kemampuan lembaga legislatif dalam kaitannya dengan fungsi dan peran yang dijalankannya pada era otonomi daerah saat ini. Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah otonomi, kemampuan lembaga legislatif akan sangat terkait dengan representasi, kontrol dan legislasi dalam penentuan kebijakan dan manajemen pembangunan daerah otonomi. Dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD, sejauh ini ada tiga anggapan yang sering muncul. Pertama, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari Kepala Daerah. Anggapan ini cenderung menilai bahwa peran Kepala Daerah masih cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas Kepala Daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislatif. Posisi baru DPRD yang kuat telah menimbulkan anggapan negatif, seolah-olah lembaga legislatif telah menjadi sebuah lembaga dan institusi politik otoriter baru, seperti halnya institusi eksekutif di masa lalu. Ini karena peran para anggotanya yang dinilai telah berlebihan dan dapat mengganggu jalannya pemerintahan sehari-hari. Sehingga peran legislatif dan eksekutif yang ideal dalam konsepsi *check and balances*, perlu didefinisikan kembali. Ketiga, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan Kepala Daerah, untuk ikut merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah. Ketiga anggapan itu mempunyai

dasar-dasar pembedannya masing-masing. Persoalannya adalah bagaimana menempatkan fungsi DPRD secara tepat dan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Propinsi Jawa Tengah sangat kompleks. Beberapa persoalan umum strategis yang muncul di Propinsi Jawa Tengah dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005. Persoalan strategis yang dimaksud antara lain adalah Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2005, Prinsip dan Basis RAPBD, kerawanan sosial, penyakit masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Apabila permasalahan tersebut di atas tidak ditangani secara baik dan benar akan menjadi penghambat utama laju pembangunan, yang pada gilirannya akan dapat menimbulkan krisis yang berlarut-larut (Mimbar Legislatif Jawa Tengah, 2004:4).

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 yang disampaikan oleh eksekutif masih banyak menimbulkan perbedaan pandangan dengan pihak legislatif dan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya fenomena-fenomena yang timbul, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. RAPBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 tidak mencerminkan kemandirian. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengurangan pembiayaan terhadap sektor yang menjadi andalan penguatan kemandirian Jawa Tengah, hal ini tentu saja hanya akan memperlemah sektor tersebut dan akibatnya program kemandirian yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis akan menjadi lambat. Pembiayaan belanja pada RAPBD Tahun Anggaran 2005 juga belum menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2003 (Kompas, 4 Nopember 2004).

2. RAPBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 rawan duplikasi anggaran. Agna Susila mengatakan bahwa apabila dicermati anggaran publik yang sebesar 849,55 miliar atau 32,23% dari RAPBD terdapat pos anggaran belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan yang dinilai sangat rawan terjadinya duplikasi anggaran (Solo Pos, 19 Nopember 2004).
3. APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 tidak rasional. RAPBD belum berpihak kepada kepentingan rakyat yang ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran untuk kepentingan aparatur masih lebih besar daripada alokasi anggaran untuk kepentingan publik. Dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) RAPBD menunjukkan biaya perjalanan dinas dan penyampaian bantuan kepada masyarakat lebih tinggi daripada jumlah yang diberikan kepada masyarakat dengan komposisi perbandingan 60:40 dan ini tidak rasional (Jawa Pos, 26 Nopember 2004).
4. Eksekutif dinilai boros dalam anggaran. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian anggaran di RAPBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 dimana hampir semua kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah selalu mencantumkan anggaran seperti honorarium, transportasi dan sewa tempat. Muzamil mempertanyakan dasar hukum dari honorarium padahal

PNS sudah menerima gaji setiap bulannya, sedang untuk transportasi dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan anggaran perjalanan dinas. Untuk masalah sewa tempat yang dianggarkan eksekutif juga dianggap pemborosan karena Pemerintah memiliki banyak bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan (Suara Merdeka, 24 Nopember 2004).

5. RAPBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 dinilai tidak taat azas efisiensi. Hussein Syifa mengatakan RAPBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 tidak taat pada azas efisiensi yang ditunjukkan dengan banyak ditemukannya alokasi anggaran yang disusun oleh tim anggaran eksekutif yang tidak didasarkan pada standar harga barang yang jelas, akibatnya cukup banyak alokasi anggaran pembelian dan pengadaan barang yang jauh lebih tinggi dibanding harga standar pasar (Solo Pos, 30 Nopember 2004).

Melihat banyaknya permasalahan yang timbul dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 maka fungsi dan peran lembaga legislatif sangat diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Fungsi dan peran legislatif dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yang dikembangkan oleh Thaib yaitu faktor Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD dan Sarana dan Anggaran. Robert Fried mengatakan faktor Kepemimpinan juga mempengaruhi Fungsi dan Peran legislatif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi dan peran DPRD Propinsi

Jawa Tengah sebagai lembaga legislatif daerah yang merupakan representasi masyarakat Propinsi Jawa Tengah terkait dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005.

Permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh faktor Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh faktor Kualitas Anggota DPRD terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh faktor Sarana dan Anggaran terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh faktor Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh faktor Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah.
2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh faktor Kualitas Anggota DPRD terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh faktor Sarana dan Anggaran terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah.



4. Mendapatkan bukti empiris pengaruh faktor Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi lembaga pendidikan, temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk kepentingan penelitian lanjutan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi DPRD Propinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut upaya peningkatan peran DPRD.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Otonomi Daerah

Dalam pengertian umum, penggunaan istilah desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. Padahal keduanya memiliki arti dan terminologi yang berbeda. Desentralisasi mempunyai makna sebagai suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang berbalikan dengan sistem sentralisasi. Jika sentralisasi berarti pemusatan pengelolaan pemerintahan maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan.

Rondinelli dan Cheema (dalam Sarundajang, 1999:47) mengemukakan pengertian desentralisasi sebagai suatu transfer perencanaan, pembuatan keputusan, atau otoritas administratif dari Pemerintah Pusat kepada organisasi atau institusi Pemerintah Daerah.

Istilah otonomi, yang seringkali dipertukarkan dengan istilah desentralisasi, secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri, sedangkan *nomos* berarti perintah. Jadi otonomi dapat diartikan sebagai memerintah sendiri.

Dalam wacana administrasi publik, daerah otonom disebut sebagai "*local self government*" dan berbeda dengan istilah "daerah" saja atau *local state government* yang memiliki arti Pemerintah di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Sarundajang (1999:27) mengartikan daerah otonom sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sarundajang (1999:38) mengklasifikasikan daerah otonom menjadi lima jenis yaitu:

1. Otonomi organik (rumah tangga organik), yaitu keseluruhan urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya daerah otonom.
2. Otonomi formal (rumah tangga formal), yaitu apa yang menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi secara positif, namun daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Otonomi materiil (rumah tangga materiil), yaitu kewenangan daerah otonom itu dibatasi secara positif dengan menyebutkan secara limitatif dan terperinci apa saja yang berhak diatur dan diurusnya.
4. Otonomi riil (rumah tangga riil), yaitu penyerahan wewenang didasarkan atas kebutuhan, keadaan dan kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.
5. Otonomi nyata, bertanggung jawab dan dinamis, yaitu daerah otonom diserahkan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan di bidang tertentu. Nyata berarti disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara obyektif di daerah. Bertanggung jawab berarti selaras dengan tujuan untuk melancarkan pembangunan. Dinamis berarti memberikan dorongan yang lebih baik atas seluruh kegiatan Pemerintah.

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah turunan (derivasi) dari asas desentralisasi, sedangkan daerah otonom adalah daerah yang mandiri. Tingkat kemandirian yang diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi tingkat atau derajat desentralisasi maka akan semakin tinggi pula tingkat otonomi daerah yang dimiliki.

Penerapan pada praktek pemerintahan di Indonesia secara ideal dapat dikatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien maka dibutuhkan tingkat desentralisasi yang tinggi. Desentralisasi dalam derajat yang tinggi menimbulkan konsekuensi kebutuhan untuk membangun daerah-daerah otonom yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi pula.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ketiga asas pemerintahan harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Kepastian hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Semua tindakan juga berimplikasi kepada hukum. Karena itu hukum harus dijadikan pegangan dan pedoman dalam menentukan cara berperilaku.
2. Keadilan dan kewajaran. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan tugas yang dilakukan harus bersifat adil dan wajar secara proporsional. Adil yang dimaksud adalah suatu perlakuan yang seharusnya diberikan sesuai dengan hukum yang menaunginya dan

pelayanan yang harus diberikan. Wajar yang dimaksud adalah bahwa tindakan yang dilakukan tidaklah berlebihan dan tidak menyepelekan.

3. Kesamaan. Pelayanan yang diberikan aparat Pemerintah tidaklah diskriminatif berdasarkan suka atau tidak suka. Sesuai dengan persyaratan hukum yang menaunginya maka setiap warga negara atau penduduk wajib mendapatkan suatu tindakan pelayanan yang proporsional.
4. Permainan yang layak. Aturan yang diberlakukan kepada setiap warga negara mengikuti pertimbangan hukum yang wajar, tidak memberatkan.
5. Cermat. Ketelitian dalam pelaksanaan tugas harus dilaksanakan agar terhindar permasalahan di kemudian hari.
6. Keseimbangan. Tindakan yang dilakukan harus dipertimbangkan dari berbagai segi secara sinergis. Tidak ada yang dirugikan.
7. Pengharapan yang wajar. Imbalan yang di dapat dari suatu pekerjaan sudah mempunyai ukuran yang baku.
8. Motivasi keputusan. Setiap keputusan ada motivasi yang mendorongnya baik bersifat preventif, problem solving, atau pro-aktif.
9. Kebijakan. Situasi dan kondisi yang berbeda-beda menyebabkan perlunya kemampuan untuk mengadaptasikan suatu tindakan terhadap lingkungan setempat.
10. Penyelenggaraan kepentingan umum. Pelayanan Pemerintah terutama ditujukan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan kelompok, golongan atau pribadi.

11. Perlindungan atas pandangan hidup. Setiap warga negara mempunyai hak atas pandangan hidupnya. Pandangan hidup bangsa haruslah diutamakan dan dibela dalam setiap tindakan aparatur Pemerintah.
12. Koordinasi dan kesatuan arah. Segenap tindakan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah haruslah ditujukan kepada satu arah yaitu tujuan negara. Pembagian kerja hanyalah merupakan suatu usaha untuk pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien. Semangat pegawai (*esprit de corps*) menjunjung kebersamaan tindakan dan kesatuan arah tindakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan asas pemerintahan adalah dasar landasan dan pedoman pokok penyelenggaraan pemerintahan. Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum. Asas-Asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, karena penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh banyak instruksi dengan keterangan, tugas dan fungsi masing-masing.
3. Asas kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, sehingga penyelenggara pemerintahan berkesempatan melakukan pelayanan prima.
5. Asas proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan.
6. Asas profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pemikiran tersebut prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Karena itu dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian juga halnya di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri dan sebagainya. Untuk itu tetap berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantu dimungkinkan tidak hanya dari Pemerintah Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.



## **B. Lembaga Legislatif Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sedikit banyak telah memfasilitasi keinginan-keinginan perubahan ke arah efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong demokrasi proses pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut juga telah membuka peluang yang lebih baik bagi optimalisasi pelaksanaan fungsi dan hak-hak DPRD, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selain itu, adanya dukungan kuat bagi DPRD untuk melaksanakan fungsinya berupa suasana ketatanegaraan yang cukup kondusif, ditambah lagi dengan rekrutman anggota DPRD yang relatif adil dan demokratis. Dukungan tersebut tentunya menguatkan legitimasi DPRD untuk mengaktualisasikan fungsinya secara lebih sempurna. Dengan melaksanakan fungsinya secara tepat, maka akan terbina keharmonisan hubungan dengan Pemerintah Daerah dan terwujudnya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang demokratis.

DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Bahkan, beberapa kalangan berpendapat bahwa secara politis, DPRD berkedudukan lebih tinggi daripada Kepala Daerah, karena salah satu hak DPRD adalah meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah. Selain itu, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah (Sadu Wasistiono dalam Marisi, 2004:10).

Selanjutnya, telah ada upaya normatif untuk melakukan reposisi dan refungsionalisasi hubungan antara DPRD sebagai badan legislatif daerah dengan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif daerah. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD, maka pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hanya terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Tentu saja reposisi dan refungsionalisasi hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah itu membawa implikasi politik yang sangat dalam. Ketika DPRD masih menjadi bagian dari Pemerintah Daerah maka peran yang dijalankan lebih banyak sebagai juru bicara eksekutif. Peran sebagai wakil rakyat yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, tidak bisa dilakukan dengan baik karena DPRD menjadi bagian inheren dari Pemerintah Daerah yang diawasi.

Setelah kedudukan DPRD terpisah dari Pemerintah Daerah, maka diharapkan bisa lebih optimal berperan menjalankan fungsi pengawasan karena DPRD tidak lagi mengawasi diri sendiri, melainkan mengawasi kinerja orang lain yaitu Pemerintah Daerah.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, tantangan yang dihadapi oleh DPRD tentu tidaklah ringan, komplek, berisiko, tetapi strategis. Badan legislatif daerah kiranya layak diharapkan berperan sebagai agen-agen pembaharu. DPRD bisa menjadi kekuatan utama yang mendorong pembentukan keadaan baru dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia. Tetapi sebaliknya, DPRD dapat pula terjebak sebagai

kekuatan utama yang memporak-porandakan landasan peradaban tata kelola pemerintahan, sehingga justru menjadi buruk, kotor dan korup.

Dengan berfungsinya perwakilan politik (DPRD), mengandung makna bahwa kebutuhan, aspirasi dan kepentingan rakyat sesungguhnya memang terlayani oleh wakil-wakilnya. Sehingga rakyat merasa sistem perwakilan politik semacam ini ternyata menghasilkan keterwakilan politik yang memadai.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan tentang hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPRD yaitu sebagai berikut: mengajukan rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protekoler dan keuangan dan administratif.

Lebih lanjut dalam Pasal 45 disebutkan tentang kewajiban yang dimiliki oleh anggota DPRD, yaitu:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
5. Menyerap, menampung, menghimpun, menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
7. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
8. Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji anggota DPRD.
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Pasal 46 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya. Alat-alat kelengkapan tersebut mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD merupakan lembaga yang bersifat kolektif, terdiri dari anggota-anggota yang dipilih menjadi Ketua dan Wakil-wakil Ketua yang bertugas untuk memimpin pengorganisasian DPRD. Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua.

3. Menjadi juru bicara DPRD.
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD.
5. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD.
6. Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan.
7. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD setelah terbentuknya Pimpinan, Komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi, yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari separuh jumlah anggota DPRD. Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Panitia Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak.
2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
4. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan.

5. Merekomendasi pembentukan Panitia Khusus.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Komisi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI dan Daerah.
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda dan Keputusan DPRD.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.
4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD.
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah.
7. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.
9. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi.
10. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Anggota diusulkan oleh Pimpinan DPRD dengan jumlah ganjil, sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya tujuh orang. Badan Kehormatan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD, yang terdiri dari Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan Fraksi. Panitia Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya APBD berupa pokok-pokok pikiran DPRD.
2. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai RAPBD baik penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang telah disampaikan Kepala Daerah.
4. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
5. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

Pasal 8 Keputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Tengah menyatakan setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi. Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, tetapi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya lima orang untuk setiap Fraksi. Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi wajib



bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya lima orang.

Lebih lanjut dalam Pasal 10 disebutkan tentang tugas Fraksi, yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politiknya.
2. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing.
3. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD.
4. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota Fraksi masing-masing.
5. Menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan komisi-komisi dan panitia-panitia.

Dalam melaksanakan tugasnya Fraksi mendapat bantuan teknis administratif dan disediakan biaya rapat Fraksi dari anggaran sekretariat DPRD. Fraksi-fraksi baik diminta atau tidak dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD.

### **C. Fungsi dan Peran Lembaga Legislatif**

Sebelum membahas fungsi dan peran lembaga legislatif terlebih dahulu dikemukakan pengertian fungsi dan peran. Fungsi menurut The Liang Gie (dalam Narang, 2002:31) adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat, pelaksanaan atau perimbangan lainnya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa untuk melakukan suatu usaha kerjasama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan tanggung jawab dari seseorang pejabat atau satuan organisasi. Pengertian peran menurut Astrid S. Susanto (dalam Narang, 2002:32) adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif. Status adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari individunya. Jadi status adalah kedudukan subyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian fungsi terkandung makna hak, wewenang dan kewajiban seseorang atau satuan badan organisasi tertentu. Satuan badan organisasi tersebut dalam hal ini adalah lembaga legislatif daerah (DPRD) sebagai wadah dimana didalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercaya atas dasar suatu pemilihan. Sedangkan peran adalah dinamisasi dari fungsi yang melekat pada seseorang atau badan dalam hal ini adalah DPRD yang di

dalamnya terdapat adanya wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Mengenai pengertian dari fungsi dan peran DPRD yang pada umumnya disebut fungsi-fungsi Parlemen atau lembaga legislatif, Abcarian dan Masannat (dalam Narang, 2002:32) menunjukkan adanya beberapa fungsi lembaga legislatif sebagai berikut:

“Secara tradisional fungsi utama dari legislatif adalah terkait dengan pembuatan kebijakan publik yang mewakili kepentingan publik atau masyarakat. .... Dan anggota legislatif tersebut kewenangan atau kekuasaan, dan tentunya bervariasi antara sistem politik yang satu dengan lainnya, dan kewenangan itu meliputi pengawasan terhadap pihak eksekutif, melakukan penyelidikan, memilih dan mengubah dan memberikan pandangan terhadap perundangan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sekaligus memberikan pelayanan dalam konteks mekanisme politik”

Menurut mereka bahwa secara tradisional, fungsi utama lembaga-lembaga legislatif adalah menetapkan kebijakan umum, dimana ini mengikat seluruh anggota masyarakat secara autoritatif. Mereka memiliki kekuatan dan ini bervariasi dari satu sistem politik ke sistem politik lain, untuk mengontrol badan-badan administratif, untuk memeriksa, memilih, mengubah, memutuskan dan memberikan saran sesuai dengan masing-masing kebijakan umum dan juga melayani sebagai forum politik yang populer. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa konsep parlementarisme menggambarkan adanya tiga fungsi, yaitu: pertama, fungsi perwakilan karena anggota lembaga ini terdiri dari mereka yang dipilih oleh rakyat. Kedua, fungsi pembuatan kebijakan karena membuat kebijakan yang bersifat mengikat semua warga, dan ketiga, fungsi pengawasan atau kontrol karena Parlemen sebagai satu-

satunya lembaga wakil rakyat berwenang mengawasi tindakan Pemerintah atau eksekutif.

Pamuji (dalam Miriam Budiarjo, 1995:116) mengatakan bahwa kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai unsur dalam pemerintahan daerah, DPRD menjalankan tugas-tugas dibidang legislatif. Sebagai badan perwakilan, DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Kaho (1997:70) mengatakan bahwa-DPRD mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah dan sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijakan daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 menyebutkan DPRD memiliki tiga buah fungsi yaitu:

1. Fungsi legislatif, yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
2. Fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
3. Fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai wakil rakyat DPRD harus mampu mewakili masyarakat yang memilihnya. DPRD harus mampu memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakatnya. Kepentingan dan aspirasi masyarakat ini beraneka ragam, baik disebabkan jumlah rakyat yang sangat besar, maupun disebabkan rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. Aspirasi atau kepentingan masyarakat dapat berwujud material seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan sebagainya, selain itu dapat pula berwujud spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan atau aktualisasi dari fungsi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Priyatmoko (dalam Miriam Budiarjo, 1995:152) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi dan peran DPRD, yaitu:

“Budaya politik dan harapan rakyat, konsepsi mengenai kekuasaan Pemerintah, struktur hukum tata negara dan tata pemerintahan, tata tertib dan prasarat penggunaan hak-hak, struktur dan sistem kepartaian, sifat kompetisi pemilihan umum, patronase politik, pengorganisasian kepentingan dan pengelompokan sosial, kematangan psikologis dan karakteristik individual lain para wakil rakyat, serta faktor-faktor situasional.”

Kedudukan DPRD adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah serta bukan bagian dari Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Kedudukan DPRD dalam politik penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Di tilik dari sudut politik, kebijakan untuk mendesentralisasikan sejumlah urusan administrasi pemerintahan ini merupakan salah satu langkah strategis yang tidak dapat dibiarkan berdiri sendiri, karena penyerahan urusan tertentu kepada daerah, pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama antara dua komponen Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974) yaitu Kepala Daerah dan DPRD.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, seyogyanya mampu dan berani untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dengan tidak mengabaikan organisasi induknya. DPRD merupakan satu wujud keikutsertaan rakyat dalam mengatur jalannya pemerintahan daerah. Keikutsertaan itu itu sangat luas, termasuk merumuskan berbagai kebijakan dan melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Fungsi DPRD ini tidak semata-mata sebagai penyalur aspirasi rakyat, tetapi juga sebagai lembaga yang memberi saran dan pertimbangan kepada eksekutif tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan. Bahkan antara kedua lembaga tersebut sudah ada pembidangan tugas yang jelas, yaitu Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD di bidang legislatif (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Thaib (dalam Narang, 2002:36) mengatakan bahwa legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki empat peran utama, yaitu sebagai berikut:

1. Peran dalam pembuatan peraturan perundangan yang merupakan fungsi dan peran pokok dari legislatif.
2. Peran dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah.
3. Peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif.
4. Peran sebagai wakil rakyat yang berfungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Dalam menjalankan peran sebagai anggota legislatif, maka pilihan maupun tindakan seseorang akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebudayaan, misalnya keluarga, norma, golongan agama dan adat istiadat. Oleh karena itu peran yang dijalankan oleh seseorang dengan lainnya akan saling berbeda tergantung kepada lingkungan sosial dan budaya dimana seseorang itu berasal.

Di samping itu, fungsi dan peran yang dijalankan anggota legislatif akan tumbuh dan berkembang dalam basis sosial tertentu, dengan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Konsekuensi logisnya adalah tampilan atau kinerja anggota Dewan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kepentingannya. Dalam masyarakat yang heterogen baik dari sisi budaya, adat istiadat dan kondisi sosial ekonomi akan melahirkan kinerja yang berbeda pada masing-masing anggota Dewan.

Sementara itu, fungsi dan peran legislatif tercermin dari pilihan atau orientasi politik yang dimilikinya. Orientasi politik adalah tindakan setiap warga negara dalam suatu sistem politik untuk memperjuangkan nilai dan

kepentingannya dan tindakan ini akan direalisasikan dalam suatu sistem dan alur politik yang ada. Setiap warga negara termasuk anggota Dewan dianggap memiliki pengaruh tertentu kepada pengambilan keputusan di dalam sistem yang bersangkutan. Artinya bahwa setiap anggota Dewan memiliki orientasi politik yang tidak jauh berbeda dengan rakyat biasa, hal ini dikarenakan mereka berasal dari masyarakat setempat dan mengalami proses sosialisasi politik yang sama. Perbedaan dengan rakyat biasa adalah bahwa mereka cenderung menerima nilai-nilai demokrasi dengan sikap positif.

Mengenai peran yang dimainkan Dewan, Sanit (dalam Narang, 2002:38) mengemukakan pendapat bahwa terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pembentukan orientasi politik anggota Dewan di Indonesia yaitu pemilih, organisasi politik, eksekutif dan diri pribadi anggota Dewan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran Anggota Dewan pada hakekatnya didasarkan kepada ide dan kepentingan dari pihak-pihak tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa peran Dewan ditandai pola-pola tertentu sesuai dengan hubungan antara mereka dengan pihak-pihak yang membawa pengaruh tersebut.

Adapun pola hubungan yang berkaitan dengan orientasi dan kepentingan politik tersebut menurut Abcarian dan Masannat (dalam Narang, 2002:38) secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *The Representative as a Trustee:*

*In this model the representative sees himself as free agent making decision and following what he considers right largely on the basis of his conviction or the dictates of his conscience. The best exposition of this role*



*has been presented by Edmund Burke's speech to the electors of bristol (1774): "Certainly, gentleman, it ought to be the happiness and glory of representative to live in strictest union, the closest correspondence, and the most unreserved communication with his constituents. Their wishes ought to have great weight with him; their opinion, high respect; their business, unremitting attention, but his unbiased opinion, his mature judgement, his enlightened conscience, he ought not to sacrifice to you, to any man, or to any set of men living."*

(Dalam model ini si wakil memandang diri pribadinya sebagai seseorang yang bebas dalam membuat keputusan dan mengikuti apa yang dia pertimbangkan adalah betul dimana ini sebagian besar berdasarkan atas keyakinan pribadi maupun hati nuraninya. Suatu penjelasan yang paling tepat mengenai peranan ini pernah disajikan oleh Edmund Burke dalam pidatonya untuk pemilih bristol (1774): "Tuan-tuan, adalah sesuatu yang berbahagia dan kehormatan bagi si wakil untuk hidup di dalam serikat yang ketat, koresponden yang akrab dan komunikasi yang cukup terbuka dengan pemilihnya. Tuntutan mereka harus diprioritaskan oleh si wakil; juga pendapat mereka; respek yang tinggi; usaha mereka; perhatian yang tidak ditawarkan, tetapi pendapat dia yang tidak memihak, keputusan dia yang cukup matang, keyakinannya sebagai seseorang yang berbudaya, dia tidak perlu dikorbankan kepada tuan-tuan, kepada siapapun atau siapa yang tinggal).

Pada pola *Trustee* (wali), si wakil sebagai anggota legislatif yang dipilih bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri melihat kepentingan-kepentingan tertentu dalam pengambilan keputusan. Meskipun dia menghargai pihak pemilih, itu tidak berarti si wakil boleh mengorbankan pertimbangan pribadi.

## 2. *The Representative as a Delegate*

*In this model the representative acts as an ambassador for his constituents. He follow instructions and expresses the attitude, support, opposition and fears of the people back home and votes in harmoni with their view on public policies. The representative in this model cannot ignore the various pressures brought to bear upon him. Under such circumstances he may begin to compromise his principles and shun making independent judgement in order to remain in office.*

(Dalam model ini si wakil bertindak sebagai duta bagi pemilihnya. Dia mengikuti instruksi dan menjelaskan sikap, dukungan, protes dan mengkhawatirkan orang-orang kembali ke rumahnya lalu memberikan suara sesuai dengan pandangan mereka atas kebijakan-kebijakan umum. Si wakil sebagaimana model ini tidak dapat menolak berbagai tekanan yang membebarkannya. Dalam suasana seperti di atas dia mulai kompromi dengan prinsip-prinsip pribadi dan mencoba menghindari keadaan dimana dia harus membuat keputusan yang independen agar mempertahankan kursinya).

Pada pola *Delegate* (Utusan), si wakil bertindak sebagai utusan atau duta yang diwakilinya sedemikian rupa sehingga dia selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugas-tugas.

## 3. *The Representative as Politico*

*The third model is rather difficult to identify. Depending on the time, place and circumstance, the politico follows a flexible interpretation of his role. He many act as a trustee on one occasion and as a delegate on another. The representative's orientation in this situation tends to be flexible in the manner he resolves the conflict of alternatives. On an issue of direct and immediate concern for his constituents he may play the delegate role and express their feelings and attitudes. However if the issue under consideration does not directly and immediately affect his constituents, he may follow the dictates of his confictions.*

(Model ketiga ini agak sulit untuk diidentifikasi, tergantung waktu, tempat dan keadaan, Politico mengikuti interpretasi yang fleksibel sesuai dengan perannya. Pada suatu saat dia bertindak sebagai seorang wali dan pada kesempatan lain bertindak pula sebagai utusan. Orientasi si wakil dalam situasi seperti di atas cenderung fleksibel sebagaimana dia menentukan pilihan-pilihan konflik. Apabila suatu isu yang dihadapinya agak mendesak dan langsung berhubungan dengan kepentingan pemilihnya, dia bertindak sebagai Delegate dan menjelaskan perasaan maupun sikap mereka. Akan tetapi apabila isu yang bersangkutan diperkirakan tidak mendesak maupun langsung mempengaruhi pemilihnya, dia mengikuti apa yang tercatat dalam keyakinan pribadinya). Pola Politico merupakan gabungan dari kedua pola di atas. Tindakannya tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya, apabila permasalahan bersifat mendesak atau berhubungan dengan kepentingan pemilihnya, si wakil akan bertindak sebagai Delegate, tetapi bila keadaannya tidak seperti di atas dia akan bertindak pertimbangan pribadi berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu *Trustee*.

#### 4. *The Representative as a Partisan*

*In this final model the representative is expected to adhere and to support the party, its program, and its leadership. He must vote with the party in order to put its platform into public policies...the representative should vote for the major issues proposed by his party.*

(Pada model terakhir ini si wakil dianggap mengikuti dan mendukung partai termasuk program-program maupun kepemimpinannya. Dia harus

memberikan suara dengan partai agar kebijakan dasarnya masuk ke dalam kebijakan umum dimana si wakil harus memberikan suaranya untuk sebagian besar isu-isu yang disarankan oleh partainya).

Pada pola partisan, si wakil bertindak sesuai dengan keinginan partai yang mendukung. Setelah si wakil dipilih lepaslah hubungannya dengan pemilihan tadi dan mulailah hubungan dengan organisasi politik yang mencalonkan dirinya dalam pemilihan tersebut.

Disamping keempat pola tersebut, pola eksekutif yang ditambahkan oleh Sanit (dalam Narang, 2002:42) juga harus diperhatikan. Sanit mengatakan bahwa kondisi masyarakat Indonesia dimana pemerintahan atau pihak eksekutif sangat dominan dalam kehidupan politik perlu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggota legislatif. Lebih lanjut dikatakan bahwa pola wakil ini tidak berorientasi kepada empat faktor di atas tetapi berorientasi kepada Pemerintah dalam hal ini eksekutif.

Robert Fried (dalam Thaib, 2000:64) mengemukakan terdapat sepuluh faktor yang mempengaruhi berfungsinya lembaga legislatif secara optimal yaitu informasi, keahlian, kekuatan sosial, popularitas, legitimasi, kepemimpinan, kekerasan, peraturan, kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, jabatan politis.

Thaib (dalam Narang, 2002:43) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atau fungsi yang dilakukan oleh badan legislatif dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

## 1. Faktor Internal

- a. Peraturan tata tertib dari lembaga legislatif yang seringkali penuh dengan pertarungan kepentingan untuk menghambat kinerja masing-masing fraksi yang ada.
- b. Kualitas anggota legislatif yang dapat diukur dari tingkat pendidikan dan kapasitas lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja mereka.
- c. Sarana dan anggaran yang diperlukan bagi kelancaran kerja lembaga legislatif.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Sistem pemilihan umum yang dilakukan.
- b. Latar belakang sejarah dan iklim politik yang berlaku.
- c. Ada tidaknya hak pemanggilan kembali anggota oleh partai politik yang ada (*recall*).

Melihat pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi dan peran dari lembaga legislatif seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada begitu banyak faktor yang secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh. Dalam suatu sistem atau alur politik yang ada maka tidak semua faktor dijadikan variabel penelitian, namun dengan pertimbangan bahwa suatu variabel dapat diikutsertakan dalam penelitian karena dianggap dominan dan relevan dalam memberikan dampak atau pengaruh yang dapat diukur. Selain itu pertimbangan praktis menjadi salah satu dasar, karena dengan diketahuinya faktor yang dominan dan relevan maka dapat dilakukan intervensi yang terencana dan sistematis untuk

memperbaiki kinerja suatu institusi maupun kinerja perorangan bagi penyempurnaan dan perbaikan yang bersifat berkelanjutan.

Dari berbagai variabel atau faktor yang disebutkan di atas maka yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota Legislatif dan Sarana dan Anggaran serta Kepemimpinan. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib merupakan mandat dan aturan yang mengikat setiap anggota legislatif dalam menjalankan peran maupun fungsinya di lembaga legislatif. Peraturan yang dibuat dan ditetapkan pada kenyataannya menjadi pertarungan antar fraksi atau kelompok untuk memperjuangkan politik yang menjadi kepentingannya. Hal ini merupakan fenomena yang layak untuk dikaji dan diteliti secara mendalam sehingga dapat diketahui elemen-elemen yang terkait dengan implikasi peraturan terhadap kinerja anggota legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.
2. Kualitas Anggota Legislatif dianggap dominan mempengaruhi fungsi dan peran anggota legislatif, karena tingkat pendidikan merupakan referensi permanen yang dimiliki seseorang dalam bertindak untuk memperjuangkan kepentingan publik dari kelompok politik pendukungnya. Variabel ini diikutsertakan agar menjadi bahan pertimbangan bagi publik untuk memperhatikan kualitas anggota legislatif dari partai pilihannya.

3. Sarana dan Anggaran dilibatkan sebagai variabel yang dominan, karena kinerja anggota legislatif secara perorangan maupun secara institusional akan berjalan lancar, jika ditunjang oleh kualitas dan kelengkapan sarana serta dukungan anggaran dalam membiayai semua kegiatan operasional lembaga legislatif secara keseluruhan.
4. Kepemimpinan dianggap dominan berpengaruh terhadap fungsi dan peran anggota legislatif, karena kemampuan Pimpinan dalam menentukan kemana arah dan tujuan internal maupun eksternal, dan menyelaraskan kemana arah dan tujuan internal maupun eksternal sekaligus menyelaraskan visi dan misi organisasi. Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap kinerja anggota legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.

#### **D. Proses Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah**

DPRD memiliki wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah. Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna. Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dengan melibatkan masyarakat luas.

Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui empat tahap pembicaraan (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004) yaitu:

1. Pembicaraan tahap pertama, meliputi:
  - a. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah.
  - b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Perda dan atau perubahan Perda atas usul prakarsa DPRD.
2. Pembicaraan tahap kedua, meliputi:
  - a. Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah:
    - 1) Pemandangan umum dari Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah.
    - 2) Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi.
  - b. Dalam hal Rancangan Perda atas usul DPRD:
    - 1) Pandapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda atas usul DPRD.
    - 2) Jawaban dari Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
3. Pembicaraan tahap ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
4. Pembicaraan tahap keempat, meliputi:
  - a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
    - 1) Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga.



- 2) Pendapat akhir Fraksi.
  - 3) Pengambilan keputusan.
- b. Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.

#### **E. Penyusunan dan Penetapan APBD**

Secara substantif APBD merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Atas rujukan yang demikian, DPRD bersama Pemerintah Daerah mesti berupaya secara sistematis, konkrit dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan begitu hak-hak masyarakat sebagai konsekuensi dari kewajibannya membayar pajak, retribusi dan sebagainya dapat diakomodasi, dipenuhi dan dilayani dengan baik. Mengacu pada kerangka pikir seperti itu, Umbu Tagela (Wawasan, 24 Januari 2002) menyebutkan beberapa prinsip penyusunan APBD sebagai berikut:

1. Keadilan anggaran. Prinsip ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran, fungsi alokasi dan distribusi pengelolaan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD mesti memperhatikan dengan serius/seksama tentang norma keadilan anggaran, sebab kalau hal ini berjalan dengan baik akan mampu meningkatkan pelayanan umum dan kesempatan kerja yang lebih baik melalui alokasi belanja dan mekanisme perpajakan atau retribusi yang adil dan transparan.

2. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Kelemahan yang paling menonjol dalam penyusunan APBD selama masa ORBA adalah digunakan pendekatan inkremental dan fragmental, yakni pendekatan yang menekankan pada peningkatan prosentase anggaran tahun ini dibanding anggaran tahun lalu dan pengalokasian dana yang bersifat parsial dan terkesan kuat hanya membagi-bagi anggaran kepada berbagai Dinas, Bagian dan instansi tanpa kohesivitas program seperti tercantum dalam Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) dan Program pembangunan daerah (Propeda). Pemerintah Daerah kurang mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, yakni kemampulayanan, kemampuhasilan dan kemampulabaan. Atas dasar itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, aparatur Pemerintah harus konsisten dalam menentukan tujuan dan lesan beserta tolok ukur dan indikator empirik dari kinerja yang disertai analisis beban kerja dan harga satuan dari setiap aktivitas.
3. Anggaran berimbang dan difisit. Prinsip ini digunakan untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran akibat perencanaan pengeluaran yang melebihi kapasitas penerimaan, seperti yang selama ini terjadi. Jika penerimaan tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi atau pinjaman yang dilakukan secara taktis dan strategis sesuai prinsip defisit anggaran. Jika terjadi sebaliknya, maka penerimaan yang melebihi target mesti dijadikan sisa lebih pada perhitungan anggaran berikutnya.

Kebiasaan yang selama ini dianut dengan memasukan penerimaan anggaran yang melebihi target penerimaan pada perubahan anggaran, walau kurang mendesak dan tidak bermanfaat bagi rakyat banyak mesti dimodifikasi agar tidak terkesan boros.

4. Disiplin anggaran. APBD mesti disusun sesuai kebutuhan riil dan prioritas kebutuhan masyarakat di daerah. Oleh karena itu maka alokasi anggaran belanja pembangunan mesti berkiblat pada kebijakan anggaran yang telah disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Pos pengeluaran lain-lain yang selama ORBA cukup banyak dan kurang jelas yang tersebar pada Dinas, Bagian dan Sekretariat Pemerintah Daerah agar dihapus. Hal ini tidak berarti bahwa Bupati/Walikota mesti melakukan asistensi anggaran sampai kepada hal-hal yang kecil.
5. Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Prinsip *code of good practices on fiscal transparency* yang didengungkan IMF, dimaksudkan untuk membangun wacana publik sebagai instrumen pengawasan pengelolaan anggaran daerah. Sudah saatnya masyarakat memiliki *access* informasi tentang APBD agar masyarakat secara obyektif dapat mengikuti proses penganggaran yang berlangsung. Pemerintah Daerah dan DPRD harus memberikan ruang yang proporsional bagi berkembangnya *social control* masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri dalam surat edaran NO. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002

menyebutkan prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan APBD sebagai berikut:

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran.** Prinsip ini merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah menyejahterakan masyarakat APBD mesti dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu atau proyek yang dianggarkan.
2. **Disiplin anggaran.** Prinsip ini menekankan bahwa APBD mesti disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Atas dasar itu, maka penyusunan anggaran mesti dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna dan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Keadilan anggaran.** Prinsip ini menekankan pada pendapatan daerah yang diperoleh dari mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Atas dasar itu Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. **Efisiensi dan efektivitas anggaran.** Prinsip ini menekankan pada dana yang tersedia yang mesti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Atas dasar itu maka arah, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat mesti dirumuskan secara eksplisit dalam perencanaan.

Selanjutnya, dalam surat edaran yang sama disebutkan arah dan kebijakan umum penyusunan APBD sebagai berikut:

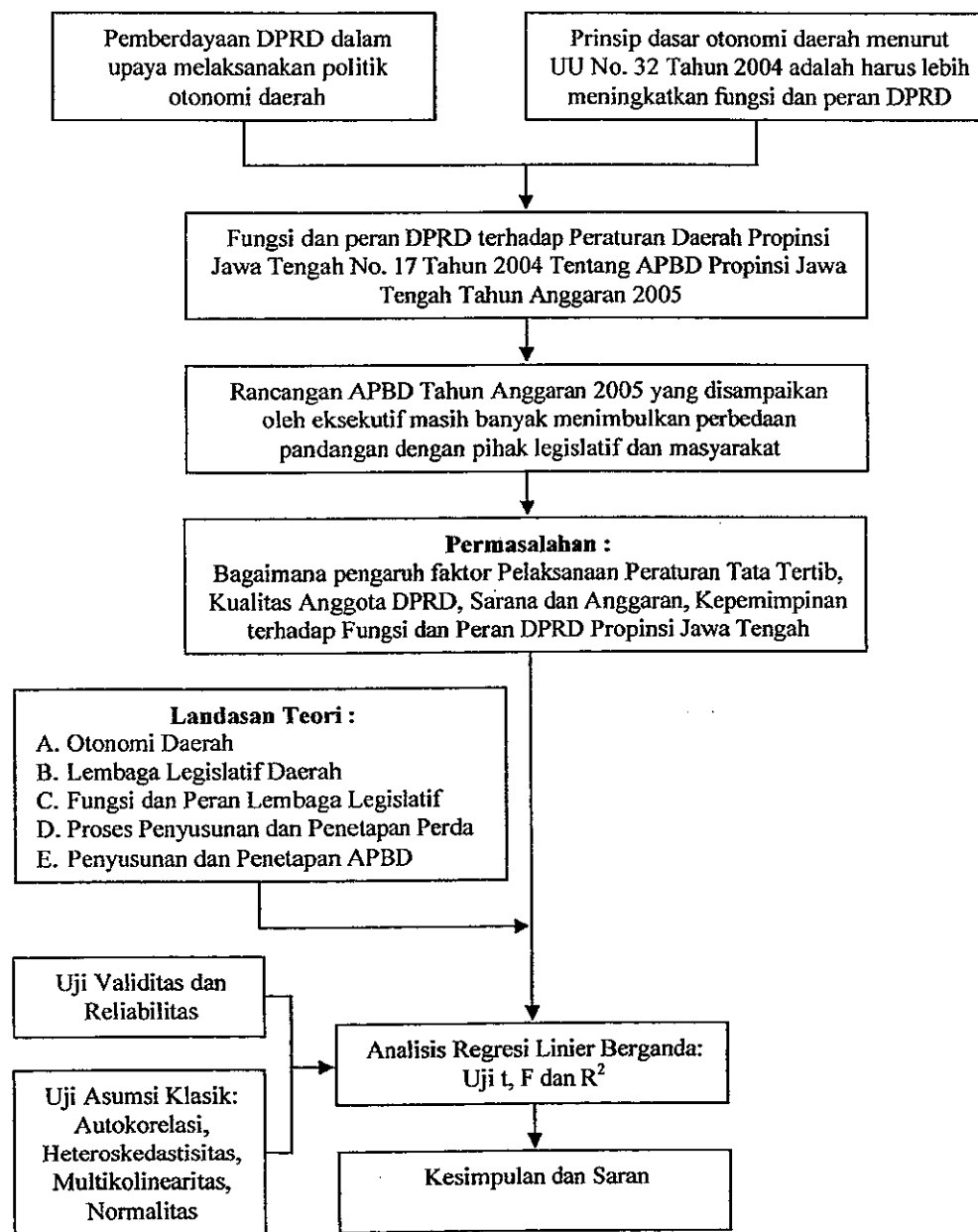
1. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka arah dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat.
4. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tentram dalam kehidupan masyarakat melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Melakukan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah.
6. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 yang aman, tertib, rahasia dan langsung.

## F. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

Skema kerangka pemikiran teoritis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

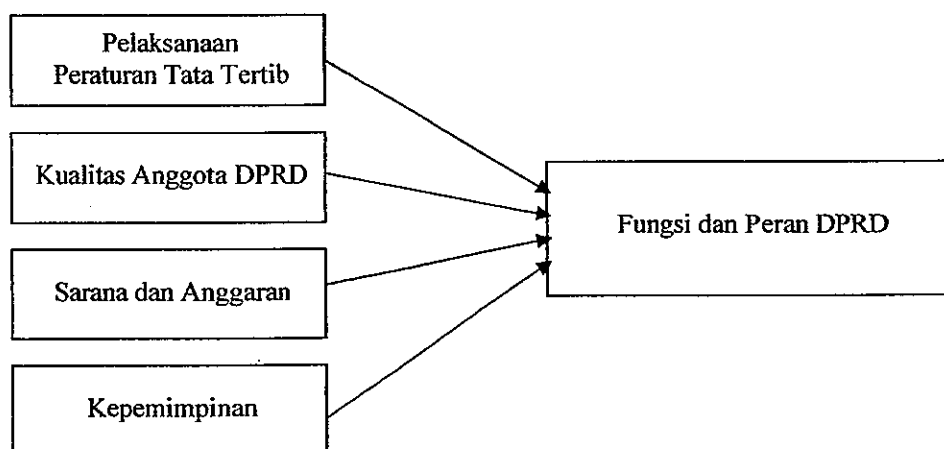
Gambar 1

### Skema Kerangka Pemikiran Teoritis



Berdasarkan skema kerangka pemikiran teoritis di atas akan diuji lebih lanjut apakah faktor Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan berpengaruh terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah terkait dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005, oleh karena itu model hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Gambar 2  
Model Hipotesis



Berdasarkan gambar di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor Kualitas Anggota DPRD terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah.

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor Sarana dan Anggaran terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Disain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Proses disain penelitian meliputi:

1. Mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.
2. Merumuskan metode penelitian yang digunakan meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, menentukan sampel, cara pengumpulan data dan menentukan variabel penelitian.
3. Menentukan jenis data yang diteliti dengan instrumen data.
4. Menentukan alat untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
5. Melakukan penelitian pada obyek yang telah ditentukan.
6. Menganalisis data secara kuantitatif melalui proses editing, coding dan tabulasi.
7. Menganalisis data secara kuantitatif dengan menggunakan rumus statistika untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
8. Menyusun laporan hasil penelitian.

#### **B. Ruang Lingkup**

Pengaruh faktor Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah terkait dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 Tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 diteliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti memiliki cakupan variabel yang banyak dan setiap variabel memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Fungsi dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah. Adapun spesifikasi penelitian bersifat regresional sesuai penggambaran pengaruh fenomena variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam menyusun, membahas, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.

## **D. Variabel Penelitian**

### **1. Klasifikasi Variabel**

Variabel dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Variabel Fungsi dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai variabel dependen dengan simbol Y.
- b. Faktor Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib merupakan variabel independen dengan simbol  $X_1$ .
- c. Faktor Kualitas Anggota DPRD merupakan variabel independen dengan simbol  $X_2$ .
- d. Faktor Sarana dan Anggaran merupakan variabel independen dengan simbol  $X_3$ .
- e. Faktor Kepemimpinan merupakan variabel independen dengan simbol  $X_4$ .

### **2. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual dari variabel penelitian adalah sebagai berikut:

#### **a. Fungsi dan Peran DPRD**

##### **1) Legislasi**

- Fungsi dan Peran DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, mulai dari tahap Rancangan Peraturan Daerah, tahap pembahasan dan sampai pada tahap penetapan yang diukur dari kualitas usulan atas materi Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD yang tidak bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi.

## 2) Anggaran

- Fungsi dan Peran DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Kepala Daerah yang diukur dari kualitas usulan yang proporsional dari anggota DPRD.

## 3) Pengawasan

- Fungsi dan Peran DPRD dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### b. Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib

- Implementasi Peraturan Tata Tertib DPRD yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.

### c. Kualitas Anggota DPRD

- Kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan Fungsi dan Perannya yang diukur dari tingkat pendidikan dan pengalaman dalam berorganisasi.

### d. Sarana dan Anggaran

- Kualitas dan kuantitas sarana yang ada untuk menunjang kinerja anggota DPRD secara keseluruhan.
- Besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan DPRD secara keseluruhan.

e. **Kepemimpinan**

- Kemampuan Pimpinan DPRD dalam mengambil keputusan.
- Kemampuan Pimpinan DPRD untuk mempengaruhi anggota sehingga mereka mau bekerjasama untuk mencapai tujuan.

**3. Definisi Operasional**

a. **Fungsi dan Peran DPRD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2005, meliputi indikator:**

1) **Legislasi**

- Pengkajian substansi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2005.
- Pembahasan dalam setiap Komisi Anggota DPRD tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2005.
- memberikan masukan berkaitan dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2005.
- Peran aktif dalam mengajukan perubahan pada saat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2005.
- Tanggapan Anggota DPRD tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2005.

2) **Anggaran**

- Alternatif sumber pendapatan lain yang dapat menjadi pemasukan dalam APBD.
- Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah berupa penggalian lebih jauh potensi wilayah yang dimiliki.

- Pemangkasan terhadap biaya-biaya dalam APBD yang saat sekarang ini masih belum diperlukan penggunaannya.
- Komposisi alokasi dana untuk belanja pelayanan publik dan Aparatur Pemerintah.

### 3) Pengawasan

- Pengawasan rutin secara periodik.
- Sanksi hukum yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku atas penyimpangan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- Menerima dan merespon laporan dari masyarakat mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah.
- Berkerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

#### b. Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, meliputi indikator:

- Ketentuan penyelenggaraan sidang/rapat anggota DPRD.
- Sanksi atas ketidakhadiran dalam sidang/rapat.
- Mekanisme penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
- Koordinasi antara Kepala Daerah dengan DPRD tentang kepentingan masyarakat.
- Ketentuan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD.

#### c. Kualitas Anggota DPRD, meliputi indikator:

- Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD.
- Program pelatihan atau pemberdayaan anggota DPRD.

- Pengalaman berorganisasi anggota DPRD.
- d. Sarana dan Anggaran, meliputi indikator:
  - Perlengkapan kantor dalam menunjang kegiatan operasional anggota DPRD.
  - Sarana transportasi untuk anggota DPRD dalam melakukan kunjungan di daerah sendiri.
  - Anggaran biaya untuk anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
- e. Kepemimpinan, meliputi indikator:
  - Proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan DPRD.
  - Penegakan disiplin kerja oleh Pimpinan DPRD.
  - Kebebasan untuk mengembangkan ide bagi anggota DPRD.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yaitu pendapat dari anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari hasil kuesioner, meliputi data tentang Fungsi dan Peran DPRD, Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran serta Kepemimpinan.

### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari data dokumentasi dan arsip DPRD Jawa Tengah, perundang-undangan dan dokumen yang mendukung penelitian.

## **F. Instrumen Penelitian**

1. Angket terstruktur, yakni daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dengan dilengkapi beberapa alternatif jawaban yang bebas dipilih oleh responden.
2. Observasi, yakni pengamatan secara langsung terhadap lingkungan fisik kerja yang terjadi pada obyek penelitian.
3. Studi dokumentasi, yakni memanfaatkan data sekunder yang tersedia di kantor DPRD Propinsi Jawa Tengah yang meliputi profile Propinsi Jawa Tengah, Anggota Dewan dan lain-lain.

## **G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Menurut Hadi (1987: 222) syarat utama agar dapat ditarik suatu generalisasi adalah bahwa sampel yang digunakan harus menjadi cermin dari heterogenitas populasi. Dalam istilah teknik statistik dikatakan sampel harus mewakili populasi atau sampel harus merupakan populasi dalam bentuk kecil. Perlunya dilakukan penarikan sampel adalah karena peneliti tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang jumlahnya besar. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah yang berjumlah 100 orang.

Mengacu pada paparan di atas maka jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Kerlinger dan Pedhazur, 1987: 199):



$$n = \frac{N Z^2 \cdot p (1 - p)}{N d^2 + Z^2 \cdot p (1 - p)}$$

dimana:

- n : jumlah sampel
- N : jumlah populasi
- Z : nilai normal dari variabel (1,96) (untuk tingkat kepercayaan 95%)
- p : harga patokan terbesar (0,50)
- d : sampling error (0,10)

Berdasarkan rumus di atas dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{100 (1,96)^2 \cdot 0,50 (1-0,50)}{100 (0,10)^2 + (1,96)^2 \cdot 0,50 (1-0,50)}$$

$$n = \frac{100 (3,8416) \cdot 0,50 (0,50)}{100 (0,01) + 0,9604}$$

$$n = \frac{96,0400}{1,9604}$$

$$n = 48,9900$$

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 48,9900 atau dibulatkan menjadi 49 anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster random sampling* yang dilakukan secara proporsional terhadap jumlah DPRD Propinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 1  
Jumlah Sampel Penelitian

No	Unsur	Populasi	Sampel
1	Pimpinan	4	$4 / 100 \times 49 = 2$
2	Komisi A	18	$18 / 100 \times 49 = 9$
3	Komisi B	18	$18 / 100 \times 49 = 9$
4	Komisi C	19	$19 / 100 \times 49 = 9$
5	Komisi D	21	$21 / 100 \times 49 = 10$
6	Komisi E	20	$20 / 100 \times 49 = 10$
Jumlah		100	49

Sumber: Mimbar Legislatif Jawa Tengah, 2004

#### H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari lima jenis variabel yaitu variabel Fungsi dan Peran DPRD, Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran serta Kepemimpinan. Variabel Fungsi dan Peran DPRD memiliki lima belas item pernyataan dan variabel bebas memiliki lima item pernyataan dengan empat alternatif jawaban yang dapat dipilih secara bebas oleh responden.

Skala penilaian berdasarkan modifikasi skala Likert dengan meniadakan jawaban ditengah-tengah. Skala pengukurannya dilakukan dengan skala interval. Skala penilaiannya adalah sebagai berikut:

- Jawaban a : skor 4
- Jawaban b : skor 3
- Jawaban c : skor 2
- Jawaban d : skor 1

## I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap pengujian yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda.

### 1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk mengukur apakah data yang diperoleh melalui kuesioner dapat dipercaya atau tidak serta dapat mewakili apa yang hendak diteliti. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*, apabila korelasi yang terbentuk antara setiap butir pernyataan dengan total skor adalah signifikan atau nilai signifikansi yang terbentuk di bawah 5% maka dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan yang diajukan melalui kuesioner adalah valid. Sedangkan uji reliabilitas adalah menguji tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat ukur semakin stabil pula alat pengukur tersebut untuk mengukur suatu gejala dan begitu sebaliknya, jika reliabilitas tersebut rendah maka alat tersebut tidak stabil dalam mengukur gejala. Pengujian dilakukan dengan *Cronbach Alpha*, apabila nilai yang terbentuk lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan reliabilitas dari variabel adalah tinggi (Ghozali, 2002).

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik meliputi uji autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan normalitas (Ghozali, 2002):

### a. Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah observasi berkorelasi antara satu dengan yang lain. Pengujian menggunakan statistik *Durbin-Watson* dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak antara  $d_u$  dan  $(4-d_u)$  maka koefisien korelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada  $d_l$  maka koefisien korelasi lebih besar daripada nol, berarti ada korelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar daripada  $(4-d_l)$  maka koefisien korelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada korelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak diantara  $d_u$  dan  $d_l$  atau DW terletak antara  $(4-d_u)$  dan  $(4-d_l)$  maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

### b. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana *varians* dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (*point*) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### c. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan linear yang “sempurna” di antara beberapa variabel independen.

Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* kurang dari 0,1 dan VIF lebih besar dari 10 maka terjadi gejala multikolinearitas. Alternatif lainnya adalah dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal ini menunjukkan indikasi multikolinearitas.

#### d. Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah sebaran data yang ada terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik Histogram dan Normal Plot. Pada analisis grafik Histogram bila grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal dan pada analisis grafik Normal Plot menunjukkan

data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda memenuhi asumsi normalitas.

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk meneliti pengaruh dari beberapa variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Persamaan matematis fungsi dari regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + U \quad (1)$$

dimana:

- Y : Fungsi dan Peran DPRD
- X<sub>1</sub> : Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib
- X<sub>2</sub> : Kualitas Anggota DPRD
- X<sub>3</sub> : Sarana dan Anggaran
- X<sub>4</sub> : Kepemimpinan
- U : Variabel Pengganggu
- a : Intecept atau konstanta
- β<sub>1,2,3,4</sub> : Koefisien parameter dari masing-masing variabel

Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*, yang secara statistik dapat diukur dari (Ghozali, 2002):

- a. Uji t, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara partial berpengaruh secara signifikan ataukah tidak terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , artinya variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Alternatif lain untuk melihat pengaruh secara partial adalah dengan melihat nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansi yang terbentuk di bawah 5% maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara partial terhadap variabel dependen sebaliknya bila signifikansi yang terbentuk di atas 5% maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara partial terhadap variabel dependen.

- b. Uji F, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan ataukah tidak terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
  1.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.
  2.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Alternatif lain untuk melihat pengaruh secara bersama-sama adalah dengan melihat nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansi yang terbentuk di bawah 5% maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, sebaliknya bila signifikansi yang terbentuk di atas 5% maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

- c. Koefisien Determinasi ( $\text{Adjusted } R^2$ ), digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $\text{Adjusted } R^2$  yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Gambaran umum obyek penelitian meliputi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004, gambaran umum responden dan statistik distribusi frekuensi.

##### **1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 disusun sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 Oktober 2004.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Desember 2004 oleh Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto dan diundangkan di Semarang pada tanggal yang sama dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah Mardijiono. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pendapatan Daerah yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp.2.897.938.086.000,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah & hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah menyumbang Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.1.915.292.086.000,00 atau 66,09%. Dana Perimbangan yang terdiri dari komponen bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.753.514.000.000,00 atau 26,00%, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang merupakan Dana Penyeimbang memberikan kontribusi sebesar Rp.229.132.000.000,00 atau 7,91%.

Belanja Daerah yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp.2.682.191.550.000,00. Belanja Daerah terdiri dari empat komponen biaya, yaitu biaya belanja aparatur daerah, biaya pelayanan publik, biaya bagi hasil & bantuan keuangan dan biaya belanja tidak tersangka. Biaya belanja aparatur daerah terdiri atas biaya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal memberikan kontribusi terhadap Belanja Daerah dalam APBD Tahun

Anggaran 2005 sebesar Rp.879.694.833.000,00 atau 32,80%. Biaya belanja pelayanan publik yang terdiri dari komponen biaya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal memberikan kontribusi yang lebih rendah dibandingkan dengan belanja aparatur daerah yaitu sebesar Rp.814.387.937.000,00 atau 30,36%. Biaya bagi hasil & bantuan keuangan yang merupakan komponen Belanja Daerah nomor tiga memberikan kontribusi terbesar terhadap Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2005 yaitu sebesar Rp.948.108.780.000,00 atau 35,35%, sedangkan biaya belanja tidak tersangka memberikan kontribusi terhadap Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.40.000.000.000,00 atau 1,49%.

Berdasarkan perhitungan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2005 di atas terdapat surplus sebesar Rp.215.746.536.000,00. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah. Kondisi surplus tersebut diseimbangkan dengan Pos Pembiayaan yang merupakan selisih antara Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Penerimaan Daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan dan piutang yaitu sebesar Rp.98.683.340.000, sedangkan Pengeluaran Daerah yang terdiri dari komponen angsuran hutang, penyertaan modal, sisa lebih anggaran tahun berkenaan dan pembayaran utang (kewajiban) yaitu sebesar Rp.314.429.876.000,00.

## 2. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah periode 2004-2009 dengan jumlah sampel sebanyak 49 orang. Gambaran umum responden akan menggambarkan kondisi responden dilihat dari jabatan, jenis kelamin, pendidikan, agama, umur, Fraksi dan pekerjaan sebelum menjadi Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah periode 2004-2009.

### a. Jabatan Responden

Kondisi responden berdasarkan jabatan dibedakan menjadi enam yaitu Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, Sekretaris Komisi dan Anggota, untuk lebih jelasnya mengenai gambaran responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 2  
Jabatan Responden

No	Jabatan	Jumlah Responden	Prosentase
1	Pimpinan DPRD	2	4,08
2	Ketua Fraksi	4	8,16
3	Ketua Komisi	2	4,08
4	Wakil Ketua Komisi	4	8,16
5	Sekretaris Komisi	3	6,13
6	Anggota DPRD	34	69,39
	Jumlah	49	100,00

Sumber: data primer, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 49 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki jabatan

sebagai Anggota DPRD yaitu sebesar 69,39%, yang memiliki jabatan sebagai Pimpinan DPRD sebesar 4,08% sedangkan yang memiliki jabatan sebagai Ketua Fraksi sebesar 8,16%. Responden yang memiliki jabatan sebagai Ketua Komisi sebesar 4,08%, Wakil Ketua Komisi sebesar 8,16% dan yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris Komisi sebesar 6,13%.

**b. Jenis Kelamin Responden**

Kondisi responden berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan, untuk lebih jelasnya mengenai gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 3  
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Prosentase
1	Laki-laki	38	77,55
2	Perempuan	11	22,45
	Jumlah	49	100,00

Sumber: data primer, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 49 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 77,55%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 22,45%.

### c. Pendidikan Responden

Kondisi responden berdasarkan pendidikan dibedakan menjadi empat kelompok yaitu SLTA, Sarjana Muda, S-1 dan S-2, untuk lebih jelasnya mengenai gambaran responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 4  
Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Prosentase
1	SLTA	15	30,61
2	Sarjana Muda	3	6,12
3	S-1	21	42,86
4	S-2	10	20,41
Jumlah		49	100,00

Sumber: data primer, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 49 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar berpendidikan S-1 yaitu sebesar 42,86%, sedangkan yang memiliki pendidikan S-2 sebesar 20,41%. Responden yang berpendidikan SLTA masih cukup tinggi yaitu sebesar 30,61% dan responden yang berpendidikan Sarjana Muda sebesar 6,12%.

### d. Agama Responden

Agama yang dianut oleh responden adalah agama Islam, Katolik dan Kristen, untuk lebih jelasnya mengenai gambaran responden berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 5  
Agama Responden

No	Agama	Jumlah Responden	Prosentase
1	Islam	42	85,72
2	Katolik	3	6,12
3	Kristen	4	8,16
Jumlah		49	100,00

Sumber: data primer, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 49 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar beragama Islam yaitu sebesar 85,72%, beragama Katolik sebesar 6,12% dan yang beragama Kristen sebesar 8,16%.

#### e. Umur Responden

Kondisi responden berdasarkan umur dibedakan menjadi lima kelompok interval, untuk lebih jelasnya mengenai gambaran responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 6  
Umur Responden

No	Umur	Jumlah Responden	Prosentase
1	Kurang dari 30 Tahun	1	2,04
2	31 Tahun – 40 Tahun	13	26,53
3	41 Tahun – 50 Tahun	20	40,82
4	51 Tahun – 60 Tahun	12	24,49
5	Lebih dari 60 Tahun	3	6,12
Jumlah		49	100,00

Sumber: data primer, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 49 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 41 tahun

– 50 tahun yaitu sebesar 40,82%, berumur 31 tahun – 40 tahun yaitu sebesar 26,53% dan yang berumur 51 tahun – 60 tahun sebesar 24,49%. Responden yang berumur lebih dari 50 tahun sebesar 6,12% dan yang berumur kurang dari 30 tahun hanya sebesar 2,04%.

**f. Fraksi Responden**

Kondisi responden berdasarkan Fraksi dibedakan menjadi tujuh Fraksi, untuk lebih jelasnya mengenai gambaran responden berdasarkan Fraksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 7  
Fraksi Responden

No	Fraksi	Jumlah Responden	Prosentase
1	Fraksi Amanat Nasioanal	4	8,16
2	Fraksi Kebangkitan Bangsa	8	16,33
3	Fraksi Keadilan Sejahtera	4	8,16
4	Fraksi Partai Demokrat	4	8,16
5	Fraksi PDI-Perjuangan	14	28,57
6	Fraksi Partai Golkar	10	20,41
7	Fraksi Persatuan Pembangunan	5	10,21
Jumlah		49	100,00

Sumber: data primer, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 49 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari FPDI-P yaitu sebesar 28,57%, FPG sebesar 20,41% dan FKB 16,33%. Responden yang berasal dari FAN, FKS dan FPD masing-masing sebesar 8,16% dan FPP sebesar 10,21%.



### g. Pekerjaan Responden

Kondisi responden berdasarkan jenis pekerjaan sebelum menjadi Anggota DPRD Jawa Tengah periode Tahun 2005-2009 dibedakan menjadi tujuh jenis pekerjaan, untuk lebih jelasnya mengenai gambaran responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 8  
Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah Responden	Prosentase
1	Advokad	2	4,08
2	Anggota DPR/DPRD	17	34,70
3	Guru/Dosen	4	8,16
4	Petani	1	2,04
5	PNS	2	4,08
6	Swasta	11	22,45
7	Wiraswasta	12	24,49
	Jumlah	49	100,00

Sumber: data primer, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 49 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini sebelum menjadi Anggota DPRD Jateng periode 2005-2009 sebagian besar memiliki jenis pekerjaan sebagai Anggota DPR/DPRD periode sebelumnya yaitu sebesar 34,70%, wiraswasta sebesar 24,49%, swasta sebesar 22,45% dan guru/dosen sebesar 8,16%. Sisanya memiliki pekerjaan sebagai advokad dan PNS masing-masing sebesar 4,08% dan petani hanya sebesar 2,04%.

### **3. Statistik Distribusi Frekuensi**

Berikut akan disajikan statistik distribusi frekuensi dari variabel Fungsi dan Peran DPRD (Y), Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib ( $X_1$ ), Kualitas Anggota DPRD ( $X_2$ ), Sarana dan Anggaran ( $X_3$ ) dan Kepemimpinan ( $X_4$ ).

#### **a. Variabel Fungsi dan Peran DPRD**

Variabel Fungsi dan Peran DPRD diukur dengan 15 butir pernyataan dimana setiap butir pernyataan diberi skor 4 untuk jawaban sangat setuju, skor 3 untuk jawaban setuju, skor 2 untuk jawaban tidak setuju dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Pernyataan nomor 1 hingga nomor 5 digunakan untuk mengukur fungsi legislasi Anggota DPRD, pernyataan nomor 6 hingga nomor 10 digunakan untuk mengukur fungsi anggaran Anggota DPRD dan pernyataan nomor 11 hingga nomor 15 digunakan untuk mengukur fungsi pengawasan Anggota DPRD.

Untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden atas pernyataan variabel Fungsi dan Peran DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 9  
Distribusi Frekuensi Variabel Fungsi dan Peran DPRD

No	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Y <sub>1</sub>	24	49,0	25	51,0	0	0,0	0	0,0	49	100,0
Y <sub>2</sub>	19	38,8	30	61,2	0	0,0	0	0,0	49	100,0
Y <sub>3</sub>	10	20,4	39	79,6	0	0,0	0	0,0	49	100,0
Y <sub>4</sub>	9	18,4	40	81,6	0	0,0	0	0,0	49	100,0
Y <sub>5</sub>	12	24,5	33	67,3	4	8,2	0	0,0	49	100,0
Y <sub>6</sub>	17	34,7	23	46,9	9	18,4	0	0,0	49	100,0
Y <sub>7</sub>	12	24,5	37	75,5	0	0,0	0	0,0	49	100,0
Y <sub>8</sub>	20	40,8	26	53,1	3	6,1	0	0,0	49	100,0
Y <sub>9</sub>	11	22,4	29	59,2	9	18,4	0	0,0	49	100,0
Y <sub>10</sub>	15	30,6	34	69,4	0	0,0	0	0,0	49	100,0
Y <sub>11</sub>	6	12,2	40	81,6	3	6,1	0	0,0	49	100,0
Y <sub>12</sub>	11	22,4	38	77,6	0	0,0	0	0,0	49	100,0
Y <sub>13</sub>	13	26,5	36	73,5	0	0,0	0	0,0	49	100,0
Y <sub>14</sub>	13	26,5	36	73,5	0	0,0	0	0,0	49	100,0
Y <sub>15</sub>	1	2,0	32	65,3	16	32,7	0	0,0	49	100,0

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pernyataan nomor 1 hingga 4 semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini berarti Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pengkajian terhadap substansi yang terkandung dalam Rancangan Perda, melakukan pembahasan Rancangan Perda dalam setiap Komisi, memberikan masukan berkaitan dengan Rancangan Perda dan berperan aktif dalam mengajukan usulan perubahan pada saat dilakukan pembahasan. Sedangkan untuk pernyataan nomor 5 yang berkaitan dengan kesediaan memberikan tanggapan terhadap Rancangan Perda yang telah ditetapkan hanya 8,2% responden yang menyatakan tidak setuju, hal ini karena tanggapan yang diberikan terhadap Rancangan Perda

yang telah ditetapkan tidak akan memberikan dampak apapun sehingga apabila mereka memberikan tanggapan hanya akan sia-sia.

Pernyataan nomor 6 sebanyak 18,4% responden menyatakan tidak setuju terhadap kesediaan setiap Anggota DPRD memberikan usulan mengenai alternatif sumber pendapatan dalam APBD, mereka berpendapat karena kemampuan dan bidang tugas dari setiap Anggota DPRD adalah berbeda.

Pernyataan nomor 7 dan 10 semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju, hal ini berarti Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran menyatakan persetujuannya untuk meningkatkan pendapatan diperlukan penggalan terhadap potensi yang dimiliki Propinsi Jawa Tengah guna meningkatkan PAD dan komposisi alokasi dana untuk belanja pelayanan publik lebih besar dari alokasi dana untuk belanja aparatur negara.

Pernyataan nomor 8 sebanyak 6,1% responden menyatakan tidak setuju terhadap dana yang digunakan untuk membiayai APBD berasal dari pinjaman, mereka berpendapat bahwa dana yang berasal dari pinjaman akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah karena di masa mendatang harus mengembalikan pinjaman bersama bunganya.

Pernyataan nomor 9 sebanyak 18,4% responden menyatakan tidak setuju terhadap pemangkasan biaya-biaya yang saat ini masih belum diperlukan penggunaannya, mereka berpendapat bahwa semua biaya yang tercantum dalam APBD sudah dikaji dengan matang dan saat ini

diperlukan untuk menunjang proses pembangunan yang dilakukan sehingga bila salah satu biaya dipangkas maka dikhawatirkan akan mengganggu proses pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Pernyataan nomor 11 sebanyak 6,1% responden menyatakan tidak setuju terhadap dilakukannya pengawasan rutin secara periodik terhadap pelaksanaan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 karena menurut mereka beban tugas yang menjadi tanggung jawab mereka sangat banyak dan tidak hanya mengawasi satu Perda saja sehingga pengawasan terhadap Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tetap perlu dilakukan tetapi tidak dilakukan pengawasan rutin secara periodik.

Pernyataan nomor 12, 13 dan 14 semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju, hal ini berarti Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan menyatakan persetujuannya untuk melakukan klarifikasi dengan eksekutif bila terjadi penyimpangan pelaksanaan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004, diberlakukan sanksi hukum yang tegas bila terjadi penyimpangan pelaksanaan Perda tersebut serta menerima dan merespon laporan dari masyarakat atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah terhadap Perda tersebut dan segera menindaklanjuti untuk dibuktikan kebenarannya.

Pernyataan nomor 15 sebanyak 32,7% responden menyatakan tidak setuju terhadap kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar (LSM,

masyarakat, media masa dll) dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 karena menurut mereka dengan banyaknya pihak yang melakukan pengawasan berarti akan banyak kepentingan yang masuk sehingga hal ini akan rawan menimbulkan benturan banyak pihak.

#### b. Variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib

Variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib diukur dengan 5 butir pernyataan dimana setiap butir pernyataan diberi skor 4 untuk jawaban selalu, skor 3 untuk jawaban sering, skor 2 untuk jawaban kadang-kadang dan skor 1 untuk jawaban tidak pernah. Untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden atas pernyataan variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 10

Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib

No	Selalu		Sering		Kadang-Kadang		Tidak Pernah		Jumlah	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
X <sub>11</sub>	6	12,2	31	63,3	12	24,5	0	0,0	49	100,0
X <sub>12</sub>	0	0,0	0	0,0	25	51,0	24	49,0	49	100,0
X <sub>13</sub>	9	18,4	24	49,0	16	32,6	0	0,0	49	100,0
X <sub>14</sub>	9	18,4	22	44,9	18	36,7	0	0,0	49	100,0
X <sub>15</sub>	11	22,5	30	61,2	8	16,3	0	0,0	49	100,0

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan pernyataan nomor 1 sebanyak 24,5% responden menyatakan kadang-kadang atas pernyataan dalam setiap penyelenggaraan sidang/rapat selalu memenuhi ketentuan yang

berlaku, hal ini berarti dalam penyelenggaraan sidang/rapat tidak selalu berdasarkan atas ketentuan yang berlaku. Pernyataan nomor 2 semua responden menyatakan kadang-kadang dan tidak pernah atas pernyataan setiap Anggota DPRD yang sering tidak hadir dalam sidang/rapat DPRD akan mendapatkan sanksi, hal ini berarti tidak ada sanksi yang tegas atas kelalaian Anggota DPRD yang tidak mau hadir dalam sidang/rapat DPRD.

Pernyataan nomor 3 sebanyak 32,6% responden menyatakan kadang-kadang atas pernyataan dalam menerima pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini berarti dalam menerima aspirasi masyarakat kadang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan nomor 4 sebanyak 36,7% responden menyatakan kadang-kadang atas pernyataan bila terjadi masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik ada koordinasi antara Kepala Daerah dengan DPRD, hal ini berarti tidak semua masalah yang terjadi di masyarakat dikoordinasikan Pemerintah Daerah dengan DPRD. Pernyataan nomor 5 sebanyak 16,3% responden menyatakan kadang-kadang atas pernyataan dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPRD selalu berlandaskan pada ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan karena dalam praktek lapangan terkadang mereka dituntut inovatif dalam mengambil keputusan.

### c. Variabel Kualitas Anggota DPRD

Variabel Kualitas Anggota DPRD diukur dengan 5 butir pernyataan dimana setiap butir pernyataan diberi skor 4 untuk jawaban sangat setuju, skor 3 untuk jawaban setuju, skor 2 untuk jawaban tidak setuju dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden atas pernyataan variabel Kualitas Anggota DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 11

Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Anggota DPRD

No	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
X <sub>21</sub>	12	24,5	37	75,5	0	0,0	0	0,0	49	100,0
X <sub>22</sub>	7	14,3	42	85,7	0	0,0	0	0,0	49	100,0
X <sub>23</sub>	2	4,1	33	67,3	14	28,6	0	0,0	49	100,0
X <sub>24</sub>	7	14,3	30	61,2	12	24,5	0	0,0	49	100,0
X <sub>25</sub>	13	26,5	36	73,5	0	0,0	0	0,0	49	100,0

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan untuk pernyataan nomor 1, 2 dan 5 semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju atas pernyataan tingkat pendidikan formal yang dimiliki, jenis pendidikan yang dimiliki dan pengalaman berorganisasi memberikan pengaruh dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD.

Pernyataan nomor 3 sebanyak 28,6% responden menyatakan tidak setuju atas pernyataan program pelatihan atau pemberdayaan Anggota DPRD yang diikuti berpengaruh pada tugas sebagai Anggota DPRD, hal ini karena kemampuan daya tangkap mereka atas program



pelatihan yang diadakan berbeda akibat pengaruh usia yang sudah tua sehingga pelatihan tersebut tidak banyak memberikan pengaruh pada pelaksanaan tugas mereka. Pernyataan nomor 4 sebanyak 24,5% responden menyatakan tidak setuju atas pernyataan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki sekarang berpengaruh terhadap kemampuan dalam menganalisis setiap Rancangan Perda yang disampaikan oleh Kepala Daerah, hal ini karena tanpa pendidikan formal dimiliki sekarangpun mereka tetap dapat melakukan analisa dengan baik terhadap Rancangan Perda.

#### d. Variabel Sarana dan Anggaran

Variabel Sarana dan Anggaran diukur dengan 5 butir pernyataan dimana setiap butir pernyataan diberi skor 4 untuk jawaban sangat memadai, skor 3 untuk jawaban memadai, skor 2 untuk jawaban tidak memadai dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak memadai. Untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden atas pernyataan variabel Sarana dan Anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 12

Distribusi Frekuensi Variabel Sarana dan Anggaran

No	Sangat Memadai		Memadai		Tidak Memadai		Sangat Tidak Memadai		Jumlah	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
X <sub>31</sub>	0	0,0	44	89,8	5	10,2	0	0,0	49	100,0
X <sub>32</sub>	0	0,0	35	71,4	14	28,6	0	0,0	49	100,0
X <sub>33</sub>	0	0,0	28	57,1	21	42,9	0	0,0	49	100,0
X <sub>34</sub>	0	0,0	20	40,8	29	59,2	0	0,0	49	100,0
X <sub>35</sub>	0	0,0	34	69,4	15	30,6	0	0,0	49	100,0

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pernyataan nomor 1 sebanyak 10,2% responden menyatakan tidak memadai atas fasilitas perlengkapan kantor yang tersedia di Sekretariat Dewan dalam menunjang kegiatan operasional Anggota DPRD, hal ini berarti masih ada kekurangan baik kuantitas maupun kualitas fasilitas perlengkapan kantor yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional Anggota DPRD. Pernyataan nomor 2 sebanyak 28,6% responden menyatakan tidak memadai atas sarana transportasi yang tersedia untuk melakukan kunjungan di daerah sendiri, hal ini berarti sebagian anggota DPRD merasa tugasnya dalam melakukan kunjungan di daerah sendiri terhambat karena masalah transportasi yang tidak memadai.

Pernyataan nomor 3 sebanyak 42,9% responden menyatakan tidak memadai atas besaran biaya pembelian pakaian dinas yang diterima, hal ini berarti dana yang diterima Anggota DPRD untuk pembelian pakaian dinas dirasakan tidak cukup. Pernyataan nomor 4 sebanyak 59,2% responden menyatakan tidak memadai atas besaran biaya perdiem yang diterima jika melaksanakan tugas keluar daerah, hal ini berarti dana perdiem yang diterima Anggota DPRD tidak cukup. Pernyataan nomor 5 sebanyak 30,6% responden menyatakan tidak memadai atas biaya konsumsi yang dikeluarkan dalam setiap pelaksanaan rapat/sidang, hal ini berarti konsumsi yang dinikmati Anggota DPRD pada saat rapat/sidang tidak memadai.

### e. Variabel Kepemimpinan

Variabel Kepemimpinan diukur dengan 5 butir pernyataan dimana setiap butir pernyataan diberi skor 4 untuk jawaban selalu, skor 3 untuk jawaban sering, skor 2 untuk jawaban kadang-kadang dan skor 1 untuk jawaban tidak pernah. Untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden atas pernyataan variabel Kepemimpinan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 13

Distribusi Frekuensi Variabel Kepemimpinan

No	Selalu		Sering		Kadang-Kadang		Tidak Pernah		Jumlah	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
X <sub>41</sub>	10	20,4	27	55,1	12	24,5	0	0,0	49	100,0
X <sub>42</sub>	8	16,3	32	65,3	9	18,4	0	0,0	49	100,0
X <sub>43</sub>	5	10,2	31	63,3	13	26,5	0	0,0	49	100,0
X <sub>44</sub>	8	16,3	33	67,4	8	16,3	0	0,0	49	100,0
X <sub>45</sub>	9	18,4	32	65,3	8	16,3	0	0,0	49	100,0

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan untuk pernyataan nomor 1 sebanyak 24,5% responden menyatakan kadang-kadang atas pernyataan setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan selalu mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota DPRD, hal ini berarti tidak semua keputusan yang diambil Pimpinan selalu mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota DPRD, khususnya keputusan yang bersifat segera. Pernyataan nomor 2 sebanyak 18,4% responden menyatakan kadang-kadang atas pernyataan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

kepentingan intern DPRD, Pimpinan selalu memperhatikan kepentingan Anggota DPRD, hal ini berarti tidak semua pengambilan keputusan yang dilakukan Pimpinan selalu memperhatikan kepentingan intern DPRD, bila keputusan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik maka kepentingan intern DPRD akan dikorbankan.

Pernyataan nomor 3 sebanyak 26,5% responden menyatakan kadang-kadang atas pernyataan setiap perintah dari Pimpinan selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini berarti tidak semua perintah yang diterima Anggota DPRD dari Pimpinan selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya bila dihadapkan pada situasi darurat yang membutuhkan penanganan segera. Pernyataan nomor 4 sebanyak 16,3% responden menyatakan tidak setuju atas pernyataan dalam menegakan disiplin kerja Anggota DPRD Pimpinan bertindak keras dan tegas, hal ini berarti sebagian Anggota DPRD tidak bisa menerima bila Pimpinan bertindak keras dan tegas dalam menegakan disiplin kerja Anggota DPRD, karena tanpa tindakan keraspun Anggota DPRD akan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan nomor 5 sebanyak 16,3% responden menyatakan kadang-kadang atas pernyataan kebebasan yang diberikan Pimpinan kepada Anggota DPRD untuk mengembangkan ide dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, hal ini berarti ada sebagian Anggota DPRD yang merasa tidak bebas mengembangkan ide dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

## B. Pengujian Reliabilitas dan Validitas

Pengujian reliabilitas dan validitas dilakukan terhadap variabel Fungsi dan Peran DPRD, Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan melalui kuesioner. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan memiliki tingkat kestabilan yang tinggi dari waktu ke waktu ataukah tidak. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner, artinya pernyataan yang diajukan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

### 1. Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat koefisien *Cronbach Alpha*, dengan kriteria jika nilai *Cronbach Alpha* yang terbentuk dari hasil pengolahan data lebih besar daripada 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Fungsi dan Peran DPRD (Y), Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib ( $X_1$ ), Kualitas Anggota DPRD ( $X_2$ ), Sarana dan Anggaran ( $X_3$ ) dan Kepemimpinan ( $X_4$ ) memiliki reliabilitas yang tinggi dan memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut dengan analisis regresi linear berganda.

Hasil uji reliabilitas dengan koefisien *Cronbach Alpha* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 14  
Alpha Cronbach

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Y	0,8534	Reliabel
X <sub>1</sub>	0,7397	Reliabel
X <sub>2</sub>	0,7198	Reliabel
X <sub>3</sub>	0,7248	Reliabel
X <sub>4</sub>	0,7227	Reliabel

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* yang dimiliki oleh variabel Fungsi dan Peran DPRD (0,8534), Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib (0,7397), Kualitas Anggota DPRD (0,7198), Sarana dan Anggaran (0,7248) dan Kepemimpinan (0,7227) lebih besar dari 0,60, hal ini berarti variabel Fungsi dan Peran DPRD, Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan memiliki reliabilitas yang tinggi.

## 2. Pengujian Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Correlation Pearson*, data dikatakan valid apabila korelasi antara butir pernyataan dengan total *score* masing-masing variabel memiliki nilai signifikan di bawah 5%, sebaliknya bila nilai signifikansi yang terbentuk dari pengolahan data di atas 5% maka dapat disimpulkan data yang diperoleh tidak valid.

Tabel : 15  
Koefisien Korelasi Pearson

Variabel	Kuesioner	Korelasi Pearson	Signifikansi	Keterangan
Y	Y <sub>1</sub>	0,732	0,000	Valid
	Y <sub>2</sub>	0,665	0,000	Valid
	Y <sub>3</sub>	0,349	0,014	Valid
	Y <sub>4</sub>	0,572	0,000	Valid
	Y <sub>5</sub>	0,605	0,000	Valid
	Y <sub>6</sub>	0,647	0,000	Valid
	Y <sub>7</sub>	0,536	0,000	Valid
	Y <sub>8</sub>	0,799	0,000	Valid
	Y <sub>9</sub>	0,663	0,000	Valid
	Y <sub>10</sub>	0,592	0,000	Valid
	Y <sub>11</sub>	0,323	0,023	Valid
	Y <sub>12</sub>	0,428	0,002	Valid
	Y <sub>13</sub>	0,522	0,000	Valid
	Y <sub>14</sub>	0,629	0,000	Valid
	Y <sub>15</sub>	0,459	0,001	Valid
X <sub>1</sub>	X <sub>11</sub>	0,696	0,000	Valid
	X <sub>12</sub>	0,590	0,000	Valid
	X <sub>13</sub>	0,816	0,000	Valid
	X <sub>14</sub>	0,720	0,000	Valid
	X <sub>15</sub>	0,665	0,000	Valid
X <sub>2</sub>	X <sub>21</sub>	0,645	0,000	Valid
	X <sub>22</sub>	0,563	0,000	Valid
	X <sub>23</sub>	0,738	0,000	Valid
	X <sub>24</sub>	0,738	0,000	Valid
	X <sub>25</sub>	0,760	0,000	Valid
X <sub>3</sub>	X <sub>31</sub>	0,588	0,000	Valid
	X <sub>32</sub>	0,617	0,000	Valid
	X <sub>33</sub>	0,750	0,000	Valid
	X <sub>34</sub>	0,763	0,000	Valid
	X <sub>35</sub>	0,728	0,000	Valid
X <sub>4</sub>	X <sub>41</sub>	0,834	0,000	Valid
	X <sub>42</sub>	0,616	0,000	Valid
	X <sub>43</sub>	0,699	0,000	Valid
	X <sub>44</sub>	0,621	0,000	Valid
	X <sub>45</sub>	0,657	0,000	Valid

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa korelasi yang terbentuk antara setiap butir pernyataan dengan total *score* masing-masing variabel adalah memiliki nilai signifikansi di bawah 5%, hal ini berarti setiap butir pernyataan yang diajukan dalam kuesioner adalah valid.

### C. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: uji autokorelasi dengan *Durbin Watson* Statistika, uji heteroskedastisitas dengan grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya, uji multikolinearitas dengan perhitungan nilai *Tolerance* serta *VIF (Variance Inflation Factor)* dan matrik korelasi antar variabel bebas dan uji normalitas data dengan analisis grafik Histogram dan Normal Plot.

#### 1. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Durbin-Watson* Statistika. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai *Durbin-Watson* yang terbentuk dari hasil pengolahan data dengan nilai *Durbin-Watson* tabel, bila nilai *Durbin-Watson* hasil pengolahan data terletak antara  $du$  (batas atas) dan  $4-du$  (4-batas atas) maka koefisien korelasi sama dengan nol dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi sehingga model analisis regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* Statistika dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel : 16  
Durbin-Watson Statistik

Durbin-Watson	Nilai Tabel			Keterangan
	dl	du	4 - du	
1,973	1,370	1,720	2,280	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data sekunder, diolah

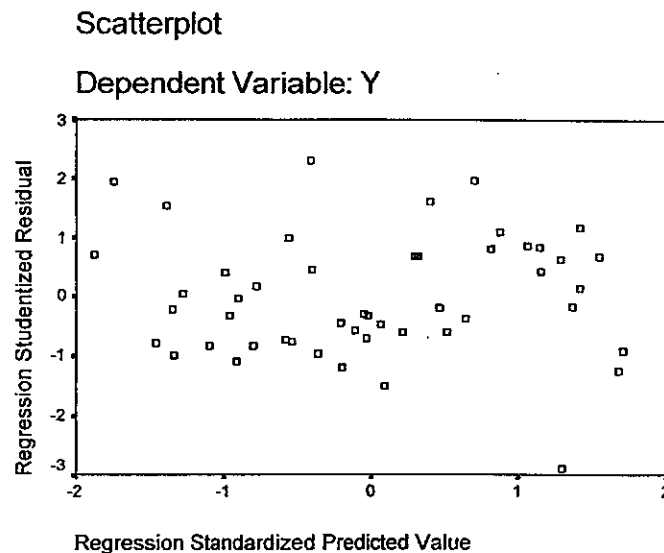
Tabel di atas menunjukkan nilai *Durbin-Watson* yang terbentuk dari hasil pengolahan data dengan program SPSS adalah sebesar 1,973, nilai ini dibandingkan dengan nilai *Durbin-Watson* tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 49 dan jumlah variabel bebas 4, maka di tabel *Durbin-Watson* akan didapatkan nilai  $dl = 1,370$  dan  $du = 1,720$ , oleh karena nilai *Durbin-Watson* (1,973) terletak antara batas atas (1,720) dan 4-batas atas ( $4 - 1,720 = 2,280$ ) maka koefisien autokorelasi adalah sama dengan nol yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik *Scatterplot* dan ditetapkan bahwa titik-titik yang terbentuk dari hasil pengolahan data harus menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan grafik *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3  
Grafik Scatterplot



Sumber: data sekunder, diolah

Gambar Grafik *Scatterplot* di atas menunjukkan titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai *Tolerance* dimana nilai yang terbentuk harus di atas 10%, dengan VIF (*Variance Inflation Faktor*) dimana nilai yang terbentuk harus kurang dari 10 dan dengan matrik korelasi ditetapkan korelasi yang terjadi antar variabel bebas kurang dari 90%. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi maka terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

Hasil perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF serta matrik korelasi antara variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib ( $X_1$ ), Kualitas Anggota DPRD ( $X_2$ ), Sarana dan Anggaran ( $X_3$ ) dan Kepemimpinan ( $X_4$ ) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 17  
Nilai Tolerance dan VIF

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X1	0,556	1,798	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X2	0,780	1,282	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X3	0,835	1,198	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X4	0,484	2,066	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 10% dan nilai *Variance Inflation Faktor* lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang serius antara variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan.

Tabel : 18  
Matrik Korelasi Antar Variabel Bebas

Korelasi	X1	X2	X3	X4
X1	1,000	-0,018	-0,032	-0,610
X2	-0,018	1,000	0,335	-0,325
X3	-0,032	0,335	1,000	-0,257
X4	-0,610	-0,325	-0,257	1,000

Sumber: data sekunder, diolah

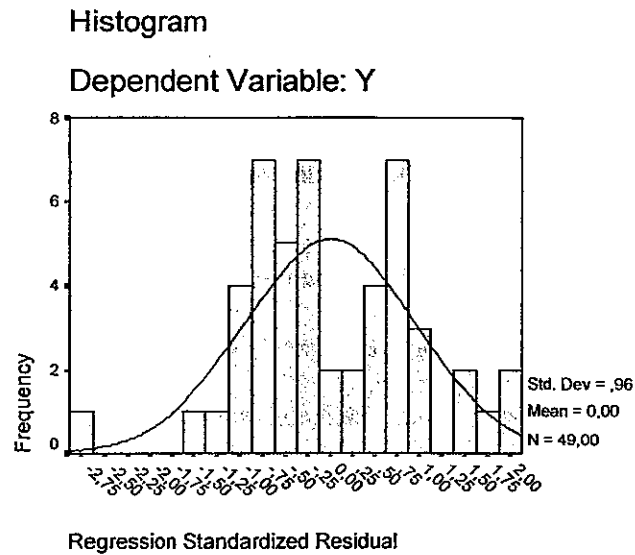
Tabel di atas menunjukkan korelasi yang terjadi antara variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan masih di bawah batas yang telah ditentukan yaitu 90% maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

#### **4. Uji Normalitas Data**

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik Histogram dan grafik Normal Plot. Pada grafik Histogram ditetapkan grafik yang terbentuk dari hasil pengolahan data harus berada pada pola distribusi yang normal atau mendekati normal, sedangkan pada grafik Normal Plot ditetapkan titik-titik yang terbentuk dari hasil pengolahan data harus menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi maka data yang tersedia untuk analisis regresi linear berganda tidak memenuhi asumsi normalitas.

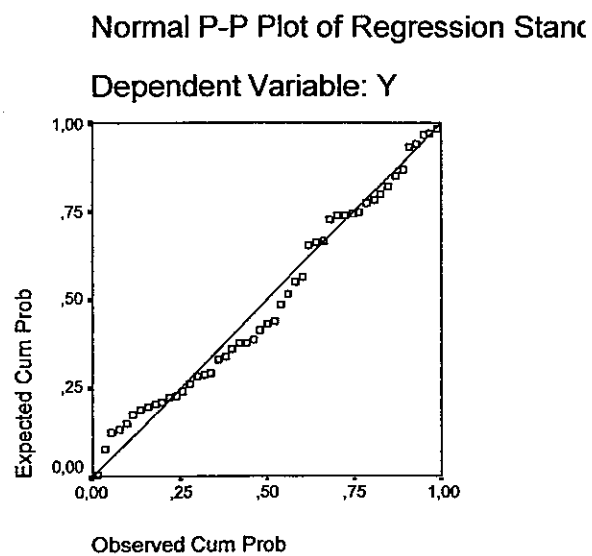
Hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu grafik Histogram dan grafik Normal Plot dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5 di bawah ini.

Gambar : 4  
Grafik Histogram



Sumber: data sekunder, diolah

Gambar : 5  
Grafik Grafik Normal Plot



Sumber: data sekunder, diolah

Dengan melihat tampilan grafik Histogram maupun grafik Normal Plot pada gambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa grafik Histogram memberikan pola distribusi yang normal dan grafik Normal Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

#### **D. Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas dan data terdistribusi secara normal, oleh karena itu data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan terhadap variabel Fungsi dan Peran DPRD dengan menggunakan bentuk persamaan linear.

##### **1. Analisis Koefisien Regresi dan Uji Secara Partial**

Hasil analisis koefisien regresi dan uji secara partial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 19  
Analisis Koefisien Regresi dan Uji Secara Partial

Variabel	Koefisien Regresi Standardized	Koefisien Regresi Unstandardized	t-Hitung	Signifikan
Konstanta		8,692		
X1	0,427	0,830	3,157	0,003
X2	0,371	0,970	3,248	0,002
X3	0,273	0,762	2,471	0,017
X4	0,081	0,168	0,560	0,578

Sumber: data sekunder, diolah

Koefisien regresi standardized menunjukkan bahwa semakin besar koefisien yang dimiliki satu variabel bebas maka akan relatif semakin dominan variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikatnya dibandingkan variabel bebas lainnya, sebaliknya bila koefisien yang dimiliki satu variabel bebas semakin kecil maka akan relatif semakin kecil pula variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikatnya dibandingkan variabel bebas lainnya.

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib ( $X_1$ ) memiliki nilai koefisien yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel bebas yang lain yaitu sebesar 0,427, hal ini berarti variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib memiliki pengaruh yang relatif paling dominan terhadap Fungsi dan Peran DPRD dibandingkan variabel Kualitas Anggota DPRD ( $X_2 = 0,371$ ), Sarana dan Anggaran ( $X_3 = 0,273$ ) dan Kepemimpinan ( $X_4 = 0,081$ ). Selanjutnya berturut-turut yang relatif dominan berpengaruh terhadap Fungsi dan Peran DPRD setelah variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib adalah variabel Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan.

Berdasarkan koefisien regresi unstandardized pada tabel di atas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,692 + 0,830 X_1 + 0,970 X_2 + 0,762 X_3 + 0,168 X_4 + U_i$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 8,692 menyatakan bahwa jika variabel bebas dianggap konstan maka akan meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD sebesar 8,692.
2. Nilai koefisien variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib sebesar 0,830 dan memiliki pengaruh positif, hal ini berarti setiap ada kenaikan variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib sebesar 1 maka akan meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD sebesar 0,830 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Hasil pengujian secara partial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,157 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, oleh karena nilai signifikansi yang terbentuk lebih kecil dari 5% berarti hipotesis 1 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib terhadap Fungsi dan Peran DPRD diterima.
3. Nilai koefisien variabel Kualitas Anggota DPRD sebesar 0,970 dan memiliki pengaruh positif, hal ini berarti setiap ada kenaikan variabel Kualitas Anggota DPRD sebesar 1 maka akan meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD sebesar 0,970 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Hasil pengujian secara partial diperoleh nilai t hitung sebesar



3,248 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, oleh karena nilai signifikansi yang terbentuk lebih kecil dari 5% berarti hipotesis 2 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan Kualitas Anggota DPRD terhadap Fungsi dan Peran DPRD diterima.

4. Nilai koefisien variabel Sarana dan Anggaran sebesar 0,762 dan memiliki pengaruh positif, hal ini berarti setiap ada kenaikan variabel Sarana dan Anggaran sebesar 1 maka akan meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD sebesar 0,762 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Hasil pengujian secara partial diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 2,471 dengan nilai signifikansi sebesar 0,017, oleh karena nilai signifikansi yang terbentuk lebih kecil dari 5% berarti hipotesis 3 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan Sarana dan Anggaran terhadap Fungsi dan Peran DPRD diterima.
5. Nilai koefisien variabel Kepemimpinan sebesar 0,168 dan memiliki pengaruh positif, hal ini berarti setiap ada kenaikan variabel Kepemimpinan sebesar 1 maka akan meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD sebesar 0,168 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Hasil pengujian secara partial diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 0,560 dengan nilai signifikansi sebesar 0,578, oleh karena nilai signifikansi yang terbentuk lebih besar dari 5% berarti hipotesis 4 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Peran DPRD ditolak.

## 2. Uji Pengaruh Secara Bersama-sama

Pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dilakukan dengan uji F dan ditetapkan bila nilai signifikansi yang terbentuk di bawah 5% maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan secara bersama-sama terhadap variabel Fungsi dan Peran DPRD, sebaliknya bila nilai signifikansi yang terbentuk di atas 5% maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Hasil analisis regresi linear berganda untuk pengujian secara bersama-sama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 20

### Pengujian Secara Bersama-sama

Model	F-Hitung	Signifikan
Regresi	13,557	0,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan dari hasil perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 13,557 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan secara bersama-sama terhadap variabel Fungsi dan Peran DPRD.

### 3. Analisis Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan terhadap variabel Fungsi dan Peran DPRD, semakin tinggi nilai koefisien determinasi menunjukkan semakin tinggi pula kontribusinya, sebaliknya bila nilai koefisien determinasi semakin rendah menunjukkan semakin rendah pula kontribusinya.

Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 21

Hasil Analisis Determinasi dan Uji Secara Bersama-Sama

Model	Adjusted R Square
Regresi	0,511

Sumber: data sekunder, diolah

Nilai koefisien determinasi ( $\text{Adjusted } R^2$ ) sebesar 0,511 atau 51,1%, hal ini berarti Fungsi dan Peran DPRD dapat dijelaskan oleh variasi variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan sebesar 51,1% sedangkan sisanya sebesar 48,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

#### **D. Diskusi**

Thaib mengatakan bahwa Fungsi dan Peran DPRD dipengaruhi oleh faktor Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD dan Sarana dan Anggaran, sedangkan Robert Fried mengatakan bahwa faktor Kepemimpinan juga mempengaruhi Fungsi dan Peran DPRD. Untuk mengetahui pengaruh keempat faktor tersebut terhadap Fungsi dan Peran DPRD secara empiris dibuktikan dengan analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari keempat variabel tersebut, Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib memiliki pengaruh yang relatif paling dominan terhadap Fungsi dan Peran DPRD dan selanjutnya berturut-turut yang relatif dominan berpengaruh terhadap Fungsi dan Peran DPRD setelah variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib adalah variabel Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan.

Permasalahan pertama dalam penelitian ini yang kemudian dirumuskan dalam hipotesis 1, setelah diuji dengan uji t pada analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD, berarti hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Thaib bahwa Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib berpengaruh terhadap Fungsi dan Peran DPRD. Oleh karena itu untuk meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD diperlukan adanya peningkatan Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib bagi Anggota DPRD, diantaranya adalah penyelenggaraan sidang/rapat yang sesuai dengan ketentuan berlaku, sanksi atas ketidakhadiran dalam sidang/rapat, ketentuan

dalam menerima pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat, koordinasi antara Kepala Daerah dengan DPRD dan ketentuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPRD.

Permasalahan kedua yang kemudian dirumuskan dalam hipotesis 2, setelah diuji dengan uji t menunjukkan bahwa Kualitas Anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD, berarti hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Thaib bahwa Kualitas Anggota DPRD berpengaruh terhadap Fungsi dan Peran DPRD. Oleh karena itu untuk meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD diperlukan adanya peningkatan Kualitas Anggota DPRD, diantaranya adalah tingkat pendidikan formal Anggota DPRD, jenis pendidikan, program pelatihan atau pemberdayaan Anggota DPRD, kemampuan dalam menganalisis setiap Rancangan Peraturan Daerah dan pengalaman berorganisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD.

Permasalahan ketiga yang kemudian dirumuskan dalam hipotesis 3, setelah diuji dengan uji t menunjukkan bahwa Sarana dan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD, berarti hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Thaib bahwa Sarana dan Anggaran berpengaruh terhadap Fungsi dan Peran DPRD. Oleh karena itu untuk meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD diperlukan adanya peningkatan Sarana dan Anggaran bagi Anggota DPRD, diantaranya adalah fasilitas perlengkapan kantor, sarana transportasi, biaya pembelian pakaian dinas, biaya perdiem jika melaksanakan tugas keluar daerah dan biaya konsumsi

yang dikeluarkan dalam setiap pelaksanaan rapat/sidang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD.

Permasalahan keempat yang kemudian dirumuskan dalam hipotesis 4, setelah diuji dengan uji t menunjukkan bahwa Kepemimpinan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD, berarti hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang dikemukakan Robert Fried bahwa Kepemimpinan berpengaruh terhadap Fungsi dan Peran DPRD. Hal ini menunjukkan saran dan pendapat dari Anggota DPRD saat pengambilan keputusan, perhatian Pimpinan terhadap kepentingan Anggota DPRD, ketentuan dalam memberikan perintah, tindakan keras dan tegas dari Pimpinan dalam usaha menegakan disiplin kerja Anggota DPRD dan kebebasan kepada Anggota DPRD untuk mengembangkan ide tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwa Fungsi dan Peran DPRD, Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan memiliki reliabilitas yang tinggi dan valid.
2. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas dan data terdistribusi secara normal, oleh karena itu data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model analisis regresi linear berganda.
3. Hasil koefisien standardizd menunjukkan secara berturut-turut variabel yang berpengaruh dominan terhadap Fungsi dan Peran DPRD adalah Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan.
4. Hasil uji t menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5% Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD dan Sarana dan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD, sedangkan kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD.

5. Hasil uji F menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5% Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD.
6. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 0,511 atau 51,1%, berarti Fungsi dan Peran DPRD dapat dijelaskan oleh variasi Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan sebesar 51,1% sedangkan sisanya sebesar 48,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib memiliki pengaruh yang relatif paling dominan terhadap Fungsi dan Peran DPRD, oleh karena itu untuk meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD perlu adanya penegakkan Peraturan Tata Tertib di kalangan Anggota DPRD di antaranya berupa pelaksanaan sidang/rapat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemberian sanksi yang tegas terhadap Anggota yang tidak hadir dalam sidang/rapat, penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya koordinasi antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam menangani masalah publik



dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan hanya memberikan kontribusi sebesar 51,1% terhadap Fungsi dan Peran DPRD, oleh karena itu perlu dikaji kembali faktor-faktor lain untuk meningkatkan Fungsi dan Peran DPRD, diantaranya adalah seperti yang dikembangkan oleh Robert Fried yaitu informasi, keahlian, kekuatan sosial, popularitas, legitimasi, kekerasan, peraturan, kekuatan ekonomi, sumber daya manusia dan jabatan politis. Selain itu juga perlu diteliti faktor eksternal yang dikembangkan oleh Thaib yaitu sistem pemilihan umum yang dilakukan, latar belakang sejarah dan iklim politik yang berlaku dan ada tidaknya hak pemanggilan kembali anggota oleh partai politik yang ada (*recall*).

# DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam, 1995, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1991, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Gafar, Afan, 2000, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Ghozali, Imam, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hadi, Sutrisno, 1987, *Analisis Butir Untuk Instrumen*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Jawa Pos, 26 Nopember 2004, *APBD Jateng Tak Rasional*.
- Kaho, J. Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 Tentang *Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah*.
- Kerlinger, Fred. N and Elazar J. Pedhazur, 1987, *Korelasi dan Analisis Regresi Ganda* (Terjemahan), Yogyakarta, Nur Cahaya.
- Kompas, 4 Nopember 2004, *RAPBD 2005 Tidak Cerminkan Kemandirian*.
- Manan, Bagir, 1999, *Menyambut Undang-Undang Baru Pemerintahan Daerah*, Makalah Tidak Diterbitkan.
- Manan, Bagir, 1999a, *Memberdayakan DPRD*, Makalah Tidak Diterbitkan.
- Marisi, Tomi, 2004, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Politik Legislatif Terhadap Penyelenggaraan Permerintah Daerah*, Yogyakarta.
- Mimbar Legislatif Jawa Tengah, 2004, Nomor 163/TH XX/2004.
- Narang, A. Reskinof, 2002, *Fungsi dan Peran Legislatif dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Yogyakarta.

Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Solo Pos, 19 Nopember 2004, *RAPBD Jateng Rawan Duplikasi Anggaran*.

Solo Pos, 30 Nopember 2004, *RAPBD 2005 Jateng Dinilai Tak Taat Azas Efisiensi*.

Suara Merdeka, 24 Nopember 2004, *Eksekutif Dinilai Boros Dalam Anggaran*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

----- 25 Tahun 1999, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

----- 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.